



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

EDISI KHUSUS

ALI WARDHANA

Usianya terbilang muda kala beban negara dipercayakan padanya. Warisan persoalan ekonomi menunggu dibereskan. Di tangan Ali dan timnya, hiperinflasi dicundangi, institusi keuangan dibenahi, penerimaan negara dikukuhkan, pun kualitas hidup masyarakat dieskalasi. Kecakapan dan kejujuran nurani jadi modal lima belas tahun mengampu Menteri Keuangan.





MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui

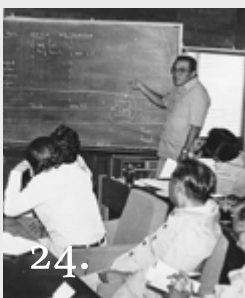
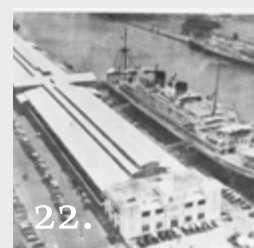


App Store



Google Play

Daftar Isi



4 SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN 6 EKSPOSUR

LAPORAN UTAMA

- 8 Ali Wardhana, 1928 - 2015
- 12 Infografis
- 14 Tuan Pelopor Pembaruan Birokrasi
- 17 Sang Penegak Reformasi Pajak
- 19 Tegas Tuntas Membenahi
- 22 Agar Berkah Minyak Tak Jadi Musibah
- 24 Berimbang dahulu, Bertumbuh Kemudian
- 26 Penakluk Hiperinflasi
- 32 Vokal di Forum Global
- 36 Mengenal Sisi Personal Sang Legenda

44 KATA MEREKA

KOLOM

- 46 Menteri Dengan Nurani Intelektual
- 48 Kontribusi Prof. Dr. Ali Wardhana bagi Indonesia
- 50 Mengenang Prof. Dr. Ali Wardhana

BUGAR

- 52 Dari Sepak Bola Sampai Teka Teki Silang

LOKAL

- 55 Alunan Mendayu Nan Mengalun Jauh

BUKU

- 56 Pak Ali, Sang Arsitek Ekonomi

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiyana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Sulastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Alit Ayu Meinarsari, Teguh Warsito, Hadi Surono, Ali Ridho, Budi Prayitno, Budi Sulistiy. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I., Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Muhammad Fabhi Riendi, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana, Hega Susilo, Ika Luthfi Alzuhri, Agus Tri Hananto, Irfan Bayu. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.



www.kemenkeu.go.id



KemenkeuRI



KemenkeuRI



KemenkeuRI



@KemenkeuRI



majalahmediakeuangan

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.



Menkeu Sri
Mulyani dan Ali
Wardhana saat
Peluncuran Buku
Ali Wardhana

Foto
Antara

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Ali Wardhana adalah sebuah legenda mengenai keuangan negara dan perekonomian Indonesia. Awal menduduki sebagai Menteri Keuangan, beliau masih dalam usia relatif muda dan memegang posisi tersebut terlalu lama yaitu hampir 16 tahun di masa Orde Baru. Beliau membangun fondasi awal pengelolaan keuangan negara yang disiplin yang menjadi fondasi stabilisasi ekonomi pada masa Orde Baru.

Langkah awal Ali Wardhana untuk mengendalikan inflasi yang mencapai diatas 600 persen merupakan fondasi penting bagi dibangunnya disiplin kebijakan APBN dan disiplin kebijakan moneter, meskipun Bank Indonesia masih belum independen. Langkah mendisiplinkan fiskal dalam pengendalian defisit dan menjaga disiplin alokasi belanja pembangunan menjadi salah satu pencapaian penting dalam membangun reputasi Indonesia dalam mengembalikan dan terus menjaga stabilitas ekonomi dan kebijakan makro ekonomi yang hati-hati.

Pada saat terjadi *boom* minyak dan gas dengan harga yang melonjak, Ali Wardhana mampu menghindarkan Indonesia dari situasi "*dutch disease*". Indonesia mampu terus menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menciptakan pemerataan kesempatan belajar/sekolah dan pelayanan kesehatan, serta membangun swasembada pangan.

Ali Wardhana juga berjasa bersama Widjojo Nitisastro dalam menegosiasikan tekanan utang luar negeri warisan Orde Lama melalui Paris Club dengan skema yang sangat menguntungkan Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat memiliki ruang fiskal untuk mulai membangun kembali ekonominya.

Di dunia internasional Ali Wardhana juga dikenal sebagai seorang yang terus memperjuangkan nasib sesama negara-negara miskin di Afrika, Asia, dan Amerika Latin untuk mendapat bantuan keuangan yang lunak dan mencukupi agar dapat membangun negara dan melepaskan diri dari kemiskinan.

Ali Wardhana adalah seorang pendobrak. Ia memiliki visi yang jelas, cerdas memilih strategi, memiliki kepemimpinan yang kuat dan yang tidak kalah penting, punya nyali dan determinasi. Kualitas pribadi Ali Wardhana sejajar dengan tokoh-tokoh pembaharu lainnya yang secara sungguh-sungguh menggunakan segala kemampuannya untuk membangun nusa dan bangsa Indonesia pada masa-masa yang tidak mudah.

Sebagai Menteri Keuangan terlalu lama yang menjabat selama 15 tahun, Ali Wardhana merupakan pembaharu di organisasi yang kita cintai ini. Ia adalah pelopor reformasi birokrasi sehingga Kementerian Keuangan bisa lebih bersih dan lebih profesional. Integritasnya ditegakkan demi kinerja Kementerian Keuangan yang lebih baik.

Dalam memerangi korupsi beliau bahkan pernah melakukan tindakan drastis dengan membubarkan Bea Cukai untuk membasmi korupsi yang sudah

sangat sangat mendarah daging.

Di sisi perpajakan, Ali Wardhana dengan Dirjen Pajak salah satunya Mar'ie Muhammad, juga meletakkan fondasi peraturan perpajakan baru untuk pengelolaan pajak di Indonesia. Dimulainya *self assessment* pajak merupakan perubahan fundamental yang sangat berharga bagi administrasi perpajakan hingga saat ini.

Dalam rangka Hari Oeang 73, Media Keuangan mengangkat perjalanan hidup Ali Wardhana sejak beliau kecil hingga dewasa, dari masa mengabdikan di Kementerian Keuangan selama 15 tahun, peranannya sebagai teknokrat di Universitas Indonesia, hingga kiprah beliau yang sangat dikenal di dunia internasional.

Semoga seluruh pembaca Media Keuangan dapat memetik hikmah dan pelajaran yang bermakna dari perjalanan hidup Bapak Ali Wardhana. Semangat pembaharu, kerja keras, dan pengabdian pada tanah air semoga dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk bangsa dan negara.

Saya juga berharap agar Media Keuangan Edisi Khusus "Ali Wardhana" dapat memberikan manfaat seluas-luasnya serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kita teladani bersama. Selamat Hari Oeang ke-73!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sri Mulyani Indrawati,
Menteri Keuangan Republik Indonesia

DE TJOLOMADOE:

Saksi Bisu Semanis Madu

Foto Anas Nur Huda

Museum yang terletak di Karanganyar (eks-Karesidenan Surakarta) ini menempati kompleks bekas pabrik gula pertama milik bumiputera. Bangunan megah yang berhasil direstorasi konsorsium BUMN ini mempertahankan bentuk dari hasil renovasi besar di tahun 1928. Simbol kejayaan industri gula tanah air, sekaligus saksi bisu lahirnya Ali Wardhana. Di tahun yang sama beliau dilahirkan di Surakarta.





Ali Wardhana, 1928 - 2015

Teks Nufransa Wira Sakti

Ali wardhana
dikenal sebagai
menteri termuda

Foto
Perpusnas



Oktober selalu menjadi bulan spesial bagi institusi Kementerian Keuangan. Sebab pada bulan ke-sepuluh ini, Kementerian Keuangan memperingati Hari Oeang setiap tahunnya. Dalam peringatan Hari Oeang ke-73 yang jatuh pada tanggal 30 Oktober 2019, Media Keuangan kembali menerbitkan edisi khusus profil mantan Menteri Keuangan. Kali ini, kami mengangkat profil mantan Menteri Keuangan yang menjabat sebagai Menteri Keuangan terlama dalam sejarah. Dia adalah Prof. Dr. Ali Wardhana.

Selama 15 tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan (1968 – 1983), Ali Wardhana menjadi tokoh penting yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Pada masa



Ali Wardhana meresmikan gedung baru kantor bursa.

Foto
Perpusnas

kepemimpinan beliau, keadaan ekonomi Indonesia yang tadinya serba tidak pasti karena inflasi yang sangat tinggi, berangsur-angsur dipulihkan. Bersama Prof. Widjojo Nitisastro, keduanya merupakan duo begawan ekonomi yang tak bisa dilepaskan dari sejarah pemulihan ekonomi di masa awal Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto.

Prestasi Ali Wardhana dimulai dari

pemulihan hiperinflasi dari 650 persen ke 10 persen, hanya dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun. Kesuksesan awal ini selanjutnya disusul oleh prestasi-prestasi Ali yang lain, hingga ekonom senior Anwar Nasution menyebutnya dengan delapan prestasi Ali Wardhana. Dikenal sebagai Menteri termuda, Ali mengawali karir sebagai teknokrat pada akhir usia 30-an. Prestasi Ali tak

terbatas pada bidang makro ekonomi dan moneter saja. Ali juga menorehkan jasa di bidang pendidikan. Sebagaimana diketahui, Ali merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia terlama yang memegang amanah hingga sepuluh tahun. Sementara pada institusi Kementerian Keuangan yang dipimpinnya, Ali sangat memperhatikan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagi para pegawai di lingkungan pemerintah. Dengan kata lain, Ali Wardhana menjadi seorang teladan birokrat sekaligus teladan pendidik. Atas dasar inilah, kami memutuskan untuk mengangkat profil beliau pada edisi khusus Media Keuangan.

Penyusunan edisi khusus Ali Wardhana diawali dengan riset kecil yang kami lakukan secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data awal terkait profil sejumlah mantan Menteri Keuangan yang akan kami angkat. Selanjutnya, proses pencarian data mengerucut pada sosok Ali Wardhana. Pencarian pun berlanjut dengan mencari sumber-sumber tulisan terkait, diantaranya buku kumpulan pidato “A Tribute to Ali Wardhana” karya Mari Elka Pangestu, kumpulan testimoni para sahabat Ali Wardhana karya Marzuki Usman berjudul “Prof. Dr. Ali Wardhana: Pembaharu Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia”, buku “Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro karya Moh. Arsjad Anwar, Aris Ananta, dan Ari Kuncoro, serta kumpulan klipring pemberitaan Ali Wardhana semasa menjabat sebagai Menteri Keuangan yang dimuat sejumlah media nasional, seperti Koran Kompas dan Majalah Tempo.

Proses riset kami matangkan

dengan curah pendapat bersama sejarawan publik, Ervien Kusuma. Dari sini, kami mendapat sejumlah data informasi dan semakin meyakinkan kami bahwa sosok Ali Wardhana sangat layak untuk diangkat pada edisi khusus ini. Guna menyempurnakan informasi yang tersebar, kami mengundang redaktur pelaksana investigasi sebuah media nasional, Bagja Hidayat, untuk membantu proses pembabakan tema, sekaligus pencarian narasumber yang tepat. Direktur pemberitaan media harian nasional, Usman Kansong, juga kami libatkan untuk proses pendalaman dan penyempurnaan unsur jurnalistik dalam edisi ini.

Tantangan dalam penyusunan edisi setahun sekali ini dimulai dari upaya mencari kontak keluarga serta para sahabat Ali Wardhana. Melalui bantuan tim penulis dari sebuah media harian nasional, serta berbekal informasi minim dari kolega sejawat Ali Wardhana, Media Keuangan berhasil bertemu dengan keluarga Ali Wardhana. Anak dan menantu Ali Wardhana adalah narasumber pertama yang kami temui. Beruntung, dari empat putra putri Ali Wardhana, kami berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu putra beliau, Mahendra Wardhana, yang merupakan putra satu-satunya yang masih tinggal di Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, kami juga bertemu dengan menantu Ali Wardhana, Ganesha Askari.

Informasi dari keluarga Ali Wardhana, serta kegiatan riset yang telah kami lakukan sebelumnya mengarahkan tim penulis dengan narasumber lain yang dikenal sebagai sahabat dan kolega Ali Wardhana. Mereka diantaranya Marzuki Usman (mantan asisten pribadi), Emil

Salim (kolega dan sahabat), dan JB. Sumarlin (mantan Menteri Keuangan sekaligus sahabat). Proses wawancara dengan para tokoh senior ini menjadi pengalaman yang istimewa bagi tim penulis. Selain beroleh kesempatan emas bertemu langsung dengan para tokoh nasional senior, berbincang dan mendengar secara langsung testimoni dari mereka menjadi pengalaman berharga bagi kami yang rata-rata berasal dari generasi milenial. Meski sayangnya, terdapat rencana tim penyusun yang tidak berhasil diwujudkan. Media Keuangan rencananya akan mewawancarai salah seorang narasumber yang merupakan kolega birokrat, sekaligus tetangga Ali Wardhana, yakni Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie. Namun dikarenakan alasan kesehatan beliau, kesempatan wawancara tersebut tidak bisa dilaksanakan, hingga akhirnya beliau wafat.

Dari proses penyusunan tulisan sosok Ali Wardhana yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 bulan, kami yang tadinya hanya tahu Ali Wardhana sebagai pejabat yang pernah mengemban Menteri Keuangan terlama, menjadi semakin kagum atas kontribusi tokoh bangsa kelahiran asli Solo ini. Jika Anda hanya tahu reformasi birokrasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, maka Anda perlu mengenal Ali Wardhana. Jika Anda hanya tahu blusukan dari Presiden Joko Widodo, maka Anda perlu mengenal Ali Wardhana. Semoga dari edisi khusus ini, para pembaca dapat mengenal lebih dekat Ali Wardhana, meneladani semangat serta pemikiran beliau, serta melanjutkan keteladanannya.

LAHIRNYA LOGO KEMENTERIAN KEUANGAN

Logo Kementerian Keuangan yang sampai dengan saat ini digunakan rupanya ditetapkan pertama kali oleh Ali Wardhana di tahun 1970 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-579/MK/6/9/1970 tentang Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Lambang Departemen Keuangan ini ditetapkan oleh Ali Wardhana dengan pertimbangan kebutuhan akan sesuatu yang mempunyai daya mempersatu dan menserasikan irama gerak kerja serta untuk membina, memupuk serta mengikat kekuatan, kesetiaan, kehormatan dan rasa kesatuan dan persatuan di lingkungan Departemen Keuangan.

Lambang atau logo Kementerian Keuangan ditetapkan dengan mengusung moto “Nagara Dana Rakca” dengan arti keseluruhan lambang yaitu ungkapan sesuatu daya mempersatukan dan menserasikan dalam gerak kerja untuk melaksanakan tugas Departemen Keuangan.

JEJAK KEBIJAKAN Ali Wardhana

Dilantik menjadi
Menteri Keuangan

Menurunkan
hiperinflasi dari 650
Persen (1966) menjadi
112 Persen (1967) hingga
85 Persen (1968)

Melakukan devaluasi
(17 April 1970)

Melaksanakan
rescheduling utang
luar negeri sebesar 2,4
miliar dolar AS melalui
Paris Agreement

1970

1968

1969

Menurunkan
hiperinflasi dari 85%
(1968) menjadi 10%
(1969)

Memberlakukan
anggaran rutin dan
anggaran pembangunan
dalam APBN

1971

Melakukan devaluasi
(21 Agustus 1971)

Menaikkan gaji PNS
33,5%

Menaikkan tunjangan
khusus PNS Kemenkeu
Sembilan kali lipat gaji
pokok disertai dengan
kebijakan perpanjangan
jam kerja pegawai
Kemenkeu

Terpilih sebagai
Chairman Board of
Governors World Bank
and IMF

Foto
Perpusnas

Mendirikan Sekolah
Tinggi Akuntansi
Negara (STAN)

1974

Mulai memanfaatkan
windfall money untuk
meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat, misalnya
pembangunan
Puskesmas dan SD
Inpres

Melakukan devaluasi
15 November 1978

Memulai tax reform

Memberlakukan
kebijakan mutasi
antarunit eselon II

Mengusulkan
pemberian pinjaman
lunak kepada seluruh
pemerintah kota dan
kabupaten

1978

Modernisasi dan
reformasi sistem
perpajakan

Mendorong
pengembangan
ekspor nonmigas

1973

1983

1972

Terpilih menjadi Ketua
Dewan Gubernur Asian
Development Bank (ADB)

Terpilih sebagai ketua
dari 20 panitia (Twenty
Comitte)

1975

Terpilih menjadi Ketua
Dewan Gubernur
Islamic Development
Bank (IDB)

1982

Melakukan deregulasi
dan debirokratisasi
untuk mengurangi
intervensi
pemerintah serta
meningkatkan peran
perusahaan negara
dan swasta

Sumber:

1. Marzuki Usman (2017). Prof. Dr. Ali Wardhana: Pembaharu Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia. PP ISEI, Jakarta.
2. Thomas D'Agnes (2012). Dr. V: An Extraordinary Journey. iUniverse, Inc, Bloomington.
3. Fakhruroji, A dan Zukarnain (2011). Kebijakan Keuangan Indonesia: Ali Wardhana Dalam Perkembangan Perekonomian Indonesia Tahun 1968-1973.
4. Anwar, M.A., Ananta, A, dan Kuncoro, A. (2007). Kesan Para Sahabat Tentang Widjojo Nitisastro. Kompas, Jakarta.
5. Yasin, M. (2014). Economic Crisis and Financial Reform in Indonesia. Asia Forum 1999.

Tuan Pelopor Pembaruan Birokrasi

Teks A. Wirananda

Inspeksi mendadak Ali Wardhana di Kantor Bendahara Negara

Foto Perpusnas

Lima puluh tahun silam, Ibu Pertiwi sedang larut dalam pilu. Anak-anaknya terbenam dalam sengkarut. Tumbuh dan berkembang dalam keterbatasan, bahkan sekadar untuk peduli pada perut. Perekonomian negara mencapai salah satu titik paling kelam. Harga kebutuhan naik tinggi, pangan pokok tak terbeli.

Di saat bersamaan, bertebaran pekerjaan rumah yang mesti segera dituntaskan oleh pemerintah. Gejala

politik, ketimpangan sosial, ketersediaan pangan, pun praktik pungutan liar, seolah makin meredupkan harapan negeri ini kala itu.

Berawal dari keraguan

Pada 1968, Presiden Republik Indonesia mendapuk seorang lelaki kelahiran Solo sebagai Menteri Keuangan, Ali Wardhana. Ia bakal memikul tanggung jawab yang tidak enteng. Semula, lelaki muda penerima beasiswa Ford Foundation

ini sempat ragu akan mampu mengatasi situasi saat itu. Soeharto tidak tinggal diam. Melalui kepemimpinannya, ia membangun kepercayaan diri Ali untuk berani mengemban tugas berat itu. Sampai akhirnya, Ali bersedia memikul peran sebagai Menteri Keuangan.

Inflasi melambung tinggi--bahkan mencapai angka 650 persen pada 1966, pinjaman pemerintah terancam gagal bayar, pun sektor produksi melemah. Mengingat catatan itu, Ali meramu upaya

untuk dapat menjaga Ibu Pertiwi baik-baik saja. Setelah melalui beragam upaya sejak dilantik, akhirnya Ali Wardhana mampu mengangkat stabilitas perekonomian Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat, inflasi dapat digembosi sampai menyentuh angka 10 persen pada 1969. Setelah stabilitas membaik, Ali mulai merapikan bagian-bagian lain dari struktur perekonomian negeri ini. Mulai dari disiplin fiskal, pelaksanaan anggaran berimbang, reformasi birokrasi, serta pemberantasan korupsi.

Sapu bersih pungutan liar

J.B. Soemarlín mengatakan saat dirinya menjadi Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) turut membantu Ali memberantas pungutan liar. Menurut kisahnya, kala itu pungutan liar terjadi di Kantor Bendahara Negara. “Ngambil gaji ke bendahara negara dipungut satu orang 25 ribu waktu itu,” katanya. Pelakunya adalah oknum pegawai di Departemen Keuangan, tepatnya di kantor Kas Negara KBN di Jalan Nusantara, Jakarta Pusat.

Dalam upayanya, J.B. Soemarlín bahkan menyamar sebagai staf sebuah satuan kerja bernama Ahmad Sidik untuk menemukan praktik pungutan liar. “Begitu saya sudah tahu pasti, Pak Ali saya ajak ke situ,” katanya. Usai kejadian itu, tidak ada lagi yang berani melakukan pungutan liar. Di beberapa kantor di lingkungan Departemen Keuangan, menurut kisahnya, saat itu kerap memasang fotonya untuk mengantisipasi inspeksi mendadak yang dilakukannya.

Kisah reformasi yang dilakukan Ali tak hanya dituturkan oleh J.B. Sumarlín sebagai sejawat menteri kala itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal selaras. “Nah beliau juga bisa dikatakan Bapak Kementerian Keuangan pertama yang membangun fondasi disiplin kebijakan fiskal. Artinya dia hanya mau belanja kalau ada penerimaannya yang *legitimate*,”

katanya. Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Ali tahu benar bahwa birokrasi itu harus baik. Ali mengerti bahwa dalam birokrasi terbuka potensi munculnya inefisiensi dan tindak korupsi. “Dari awal beliau sangat tahu mengenai sangat bahayanya penyakit korupsi, begitu sangat mematakannya korupsi itu,” ia melanjutkan, “Pak Ali Wardhana adalah yang sebenarnya melakukan reformasi birokrasi awal untuk membangun Kementerian Keuangan yang seharusnya lebih bersih dan lebih profesional, lebih kompeten.”

Secara konsep, upaya yang dilakukan Ali sejatinya senada dengan upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian Keuangan belakangan ini. Ali Wardhana bahkan memberikan tunjangan khusus kepada pegawai Kementerian Keuangan sampai sembilan kali lipat lebih tinggi dari institusi yang lain. Selain upaya mengungkit kesejahteraan pegawai, Ali juga merombak kebijakan dengan melakukan deregulasi. Kebijakan lain terkait reformasi birokrasi yang cukup mashyur di republik ini adalah pembekuan Bea Cukai.

Terapi Kejut dan Pemikiran Progresif

Terkait pembubaran instansi yang saat itu ditengarai menjadi arena pungutan liar ini, Chatib Basri berkisah tentang situasi saat itu. “Pak Harto bilang memang ini tidak bisa lagi,” ia melanjutkan, “Sudah dilakukan *reform* segala macam tidak cukup juga, korupsinya masih terjadi, pungutan masih terjadi, sudahlah bubarin saja. Istilahnya dibubarin itu dirumahkan.” Saat itu, fungsi pemeriksaan dialihkan ke Suisse Generale Surveillance (SGS). Ia mengatakan untuk situasi saat itu, terapi kejut dan pengalihan fungsi macam ini terbukti efektif. Kendati, ia berpendapat, kebijakan itu musykil dilakukan di era sekarang.

Lebih dari itu, Ali Wardhana mewariskan kebijakan yang masih dilestarikan sampai saat ini. Warisan yang masih relevan lintas generasi, *self assesment* di bidang perpajakan. Terkait

JIWA SENI ALI

Selain olah raga, Ali Wardhana juga memiliki minat seni yang cukup tinggi. Hal ini bisa terlihat dari koleksi lukisan yang dia miliki, antara lain lukisan karya Basuki Abdullah, Chusien, Soekamto, dll. Tak hanya itu, sebagai pria berdarah Jawa, Ali gemar dengan kesenian wayang orang. Saking cintanya pada wayang orang, Ali muda pernah bermain wayang orang dan berperan sebagai Ken Arok dalam lakon Ken Arok Ken Dedes. Lain cerita dengan istri Ali, Rendasih yang memiliki hobi melukis. Melukis bunga menjadi kegemaran Rendasih. Tak heran di kediaman Ali, terdapat beberapa koleksi karya Rendasih.

kebijakan ini, Chatib Basri menyanjung pemikiran progresif Ali. “Pak Ali itu termasuk orang yang *skeptical* dengan birokrasi. Jadi kalau birokrasi dikasih wewenang terlalu banyak nanti di-*abused*, jadi kalau pajak itu ditentukan (pemerintah), dia akan *abuse* orang. Jadi caranya yang paling baik adalah *dilakukan self assesment*,” katanya.

Selaras dengan Chatib Basri, Sri Mulyani pun menyanjung pemikiran Ali Wardhana terkait penerapan *self assesment*. “Itu adalah perubahan *mindset* yang fundamental karena memang itulah yang dipakai kalau satu negara mau menggunakan *tax base* yang luar biasa besar,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Ali Wardhana progresif meninggalkan warisan besar untuk perekonomian Indonesia. Ia yang memandikan tubuh keuangan negeri ini. Ia lantas memolesnya. Ali Wardhana menuntaskan tugasnya dalam lima belas tahun kepemimpinan. Periode kepemimpinan Menteri Keuangan paling lama sepanjang sejarah republik ini.

Sang Penegak Reformasi Pajak

Teks Reni Saptati D.I.

Tatkala Ali memimpin Kementerian Keuangan, sumur minyak dalam negeri memanen jutaan barel per hari. Pemasukan ke kas negara mengalir deras, sumber penerimaan sektor minyak dan gas mendominasi. Namun, Ali tak ingin terlena dengan tuah minyak. Ia pun merancang langkah besar reformasi pajak.

Ali Warhana memperkenalkan asas pemungutan pajak *self assessment*

Foto
Dok. DJP



Kegelisahan Ali tak semata perkara ketergantungan APBN yang besar terhadap penerimaan migas. Sejak awal pemerintahan Orde Baru, bahkan dari pertama Indonesia berdiri, perpajakan di Indonesia menggunakan sistem peninggalan kolonial Belanda. Tarif beragam dan rumit, lagi sistem pemungutannya berbelit. Bayangkan, 58 tarif pajak dikenakan kepada masyarakat. Sebanyak 48 tarif untuk pajak perorangan dan 10 tarif untuk badan. Siapa yang tak bingung berhitung?

Penyempurnaan sistem perpajakan tak serta merta terjadi. Pelan-pelan, Ali merintisnya dari awal menjabat Menteri Keuangan. Pada tahun 1970, alumnus Universitas California tersebut mengubah tarif pajak pendapatan supaya lebih adil. Ia pun memberi keringanan pajak penjualan, pajak perseroan, dan bea ekspor-impor agar program penanaman modal dalam negeri kala itu meraih sukses.

Namun, angka pendapatan pajak masih saja rendah, baik jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, maupun dilihat dari posturnya di APBN. Tampak jelas dalam dokumen anggaran negara bahwa migas masih terus-terusan jadi andalan. Pada akhir 1970-an hingga 1980-an, penerimaan pajak nonmigas tak sampai menggapai 30 persen dari seluruh penerimaan pajak.

Titik tolak reformasi perpajakan besar-besaran oleh Ali Wardhana, dikisahkan Marzuki Usman, ditegakkan pada 1978. Mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang juga pernah menjadi Ketua Bapepam dari 1988-1992 ini bercerita, pada suatu hari di

tahun itu, Ali pernah memanggilnya untuk menghadap. Dalam kesempatan itu, sang menteri mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan reformasi perpajakan sehingga kontribusi penerimaan pajak mampu meningkat secara signifikan. Marzuki diminta untuk menghubungi Malcolm Gills dari Harvard Institute for International Development. Gills dikenal luas pernah mengerjakan program reformasi perpajakan di Bolivia.

Tak lama kemudian, cerita Marzuki, Tim Reformasi Pajak dibentuk. “Pak Ali sebagai ketuanya, sedangkan saya sebagai sekretarisnya,” tutur Marzuki. Meskipun tim ini telah ada sejak 1978, mereka baru diresmikan pada 1981. Selama bertahun-tahun, mereka merancang undang-undang baru seputar perpajakan. Tujuannya jelas, yaitu memperbaharui sistem perpajakan yang telah usang dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor nonmigas.

Pada tahun 1983, Ali sang teknokrat berhasil merampungkan sistem perpajakan baru yang lebih sederhana dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat. Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang perpajakan telah dirumuskan, yaitu RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Pajak Penghasilan (PPh), dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Namun, belum sempat ketiga RUU ini ditetapkan, pada kabinet baru tahun 1983, Ali diamanahi jabatan baru oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan. Estafet tugas sebagai Menteri Keuangan diteruskan kepada Radius Prawiro

BINTANG DARI NEGERI SAKURA

Atas jasanya meningkatkan hubungan negara Indonesia dan Jepang, Ali Wardhana pernah memperoleh penganugerahan bintang jasa tertinggi, The Grand Gordon of the Order of the Sacred Treasure atau Bintang Jasa Harta Suci Agung dari pemerintah Jepang pada Desember 1988. Dalam acara penyematan bintang jasa dari negeri sakura itu, dubes Jepang Edamura mengatakan bahwa nama Ali Wardhana mirip dengan Bahasa Jepang ‘Arewa Warudana’ yang secara hiperbola berarti “orang luar biasa, penuh inspirasi” dan dalam Bahasa Inggris berarti resourceful – dapat memecahkan segala kesukaran dan menemukan solusi. Penghargaan ini melengkapi sederet penghargaan lainnya, diantaranya penghargaan dari Belanda dan Belgia. Selain itu, ia pernah diberi gelar oleh majalah ternama AS, Institutional Investor, sebagai Menteri Keuangan nomor tiga terbaik di dunia setelah Jesus Silva-Herzog dari Meksiko dan Mohamed Ali Abalkhail dari Arab Saudi.

yang berhasil mengajukan ketiga RUU kepada DPR pada 5 November 1983. Era baru perpajakan dimulai setelah ketiga RUU tersebut ditetapkan DPR pada 31 Desember 1983 dan mulai diberlakukan

TEKNOKRAT YANG JUGA PENDIDIK

Kiprah Ali Wardhana di pemerintahan sudah tak diragukan lagi. Namun, sebelum menjadi teknokrat, Ali memulai karirnya menjadi seorang dosen dan selama menjabat Menteri Keuangan ia juga menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selama sepuluh tahun. Ali memulai karir sebagai asisten dosen bidang moneter di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia memang dikenal ahli dalam bidang ekonomi makro dan moneter. Studi doktornya di University of California rampung di tahun 1962 dengan judul disertasi "*Monetary Policy in an Underdeveloped Economy with Special Reference to Indonesia*". Tulisan ilmiah Ali Wardhana juga dipublikasikan secara nasional ataupun internasional, seperti *Foreign Exchange and Its Implications in Indonesia*.

Sebagai dosen, ia dikenal sebagai dosen yang bisa menjelaskan materi dengan singkat dan jelas. Ia biasa meminta para mahasiswanya mencari sendiri topik-topik yang relevan dengan materi yang sedang diajarkan. Banyak juga yang tertipu penampilannya yang terkesan pendiam dan galak, nyatanya dalam kesehariannya Ali adalah seorang yang ramah dan santai. Dia termasuk dosen yang terbuka dan mau menerima masukan dari anak-anak muda dan para mahasiswanya.



Gedung Kantor
Wilayah IPEDA

Foto
Dok. DJP

pada 1 Januari 1984.

Ali memperkenalkan asas pemungutan pajak *self assessment* pada sistem perpajakan yang baru, menggantikan asas *official assessment*. Dalam *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung kewajiban perpajakannya sendiri. Sementara, dalam *official assessment*, petugas pajak yang melakukan penghitungan. Pada masa itu, *self assessment* merupakan mekanisme baru yang belum banyak diterapkan di dunia. Namun, Ali-lah yang mendorong Indonesia segera menggunakannya.

Chatib Basri, Menteri Keuangan 2013-2014, menyebut Ali sebagai sosok yang meyakini bahwa pemerintah jangan diberi wewenang terlalu berlebihan. Bagi Ali, jika wewenang birokrasi terlalu banyak, mereka cenderung akan menyalahgunakannya, termasuk dalam pajak. "Jadi, cara yang paling baik adalah menerapkan *self assessment*," ujar Chatib.

Hal baru lainnya yang dikenalkan Ali adalah PPN. Sama halnya dengan *self assessment*, PPN juga masih belum banyak diterapkan di berbagai

negara, bahkan cukup kontroversial saat itu. Namun, Ali optimis PPN akan mampu membawa peningkatan pada penerimaan sektor nonmigas. Warisan Ali ini terbukti berpengaruh bagi pertumbuhan pajak dan perekonomian Indonesia hingga kini.

Sistem perpajakan baru yang digagas Ali terasa dampaknya tak lama setelah diberlakukan. Jumlah wajib pajak meningkat 100 persen pada tahun pertama pemberlakuan UU baru, dari sekitar 411.000 wajib pajak pada tahun 1983 menjadi 852.000 wajib pajak pada Maret 1984. Peningkatan pelayanan aparatur pajak serta sistem pemungutan yang lebih adil disebut sebagai alasan pesatna kenaikan jumlah wajib pajak baik perorangan maupun badan.

Kenaikan wajib pajak berbanding lurus dengan kenaikan penerimaan pajak dan alokasi dana pembangunan dalam APBN. "Peran pajak menjadi sangat penting. Perubahan secara signifikan dilakukan mulai tahun 1984. Kemudian, Indonesia mengakhiri era ketergantungan penerimaan negara dari migas," tegas Chatib.

Tegas Tuntas Membenahi

Teks Reni Saptati D.I

Bukanlah sebuah rahasia, jika dahulu kala banyak pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersikap bak raja kecil yang gemar menyalahgunakan kuasa. Meski telah diberikan tunjangan khusus hingga sembilan kali gaji, penyelewengan yang terjadi tak begitu saja berhenti. Ali tak mau tinggal diam. Baginya, integritas harus dijunjung tinggi oleh institusi.



Ali Wardhana berhasil membenahi Ditjen Bea dan Cukai menjadi institusi makin bersih dan makin baik

Foto
Perpusnas

”

Dua dasawarsa lebih merdeka, Ali bertekad Ditjen Bea dan Cukai harus di tata

Menengok sejarah negeri, lembaga bea dan cukai sudah eksis sebelum bangsa ini merdeka. Pada masa Hindia Belanda, keberadaannya terdeteksi dengan nama De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen atau Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai. Petugasnya bergelar douane. Berabad sebelumnya, diduga berbagai kerajaan di nusantara pun punya lembaga serupa dengan sebutan berbeda.

Para douane pernah ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Arus lalu lintas barang di Tanjung Priuk sering dimanfaatkan pejuang untuk menyelundupkan barang demi membiayai revolusi. Akan tetapi, cerita heroik itu tentu tak membenarkan keberlangsungan tindak kecurangan usai NKRI tegak berdiri.

Dua dasawarsa lebih merdeka, Ali bertekad Ditjen Bea dan Cukai harus ditata. Tak boleh lagi lembaga itu dipenuhi benalu penghisap uang negara. Indonesia juga butuh biaya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. “Saya bisa bayangkan itu adalah fenomena yang luar biasa kompleks, sangat sulit, dan bahkan mungkin bisa dikatakan *impossible* untuk bisa diselesaikan,” Menteri Keuangan Sri Mulyani melukiskan situasi kala itu.

Ketika Ali mulai menjabat sebagai

menteri, penyelewengan di Bea dan Cukai masih marak terjadi. Emil Salim, kolega Ali di kabinet pemerintahan Orde Baru, menggambarkan secara sederhana betapa parahnya kondisi di sana. “Di Bea Cukai banyak orang kaya raya hingga tujuh turunan,” ujar Emil.

Menurut Emil, mudah saja bagi Ali jika ingin menumpuk kekayaan dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Lahan basah, kata orang-orang. Namun, Ali adalah Ali, sang teknokrat berintegritas tinggi. Pria kelahiran Solo tersebut tak silau akan harta terlarang. Ia pun enggan institusi yang dipimpinnya sarat dengan tindak korupsi. Meski dihadapkan pada kuatnya resistensi, Ali tegas membenahi Bea dan Cukai.

Pada Mei 1971, Ali menyambangi kantor Bea Cukai di Tanjung Priuk. Bagaimana tak ingin marah, ia melihat para petugas bersantai-santai, bukannya memberi pelayanan seperti seharusnya. Si menteri berkacamata itu makin geram usai mendengar kabar suram tentang usaha penyelundupan ratusan ribu baterai merek terkenal. Padahal, ia baru memberikan tunjangan khusus sebesar sembilan kali gaji. Kenaikan tersebut bukan sebarang hadiah, melainkan disertai tuntutan kenaikan pelayanan dan peniadaan penyelewengan.

Peringatan kepada Bea dan Cukai tak sekali dua kali Ali sampaikan.

Sebagaimana ditulis harian Kompas pada 26 Januari 1973, Ali memberikan teguran lisan di depan forum Konferensi Kerja Para Kepala Insektorat dan Inspeksi Bea dan Cukai. Pria lulusan Universitas Indonesia dan Universitas California tersebut menyatakan tak segan-segan mengadakan tindakan perbaikan dalam tubuh Bea dan Cukai. Ia pun menekankan agar segala bentuk penyelewengan dan penyelundupan tidak terulang lagi.

Gebrakan lain yang Ali ambil untuk meredam tindak kecurangan di Bea dan Cukai ialah penerapan mutasi pejabat eselon II antarunit eselon I. Pada 1978, Ali merealisasikan langkahnya. Direktur Cukai sempat digantikan pejabat dari unit eselon I lain dalam beberapa kali kesempatan. Akan tetapi, hal tersebut ternyata tak kunjung efektif meningkatkan kinerja Bea dan Cukai.

Ali bagai bertemu jalan buntu. Hingga Presiden Soeharto mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan pada 1983, Bea dan Cukai masih dipenuhi benalu. Hingga akhirnya, pada tahun 1985, Ali membuat langkah penuh kejutan. Untuk meningkatkan kelancaran arus barang demi efektivitas kegiatan ekonomi, pria kelahiran 6 Mei 1928 itu mengusulkan kepada Presiden Soeharto untuk menutup Bea dan Cukai.

“Situasinya sangat mendesak karena waktu itu perizinan harus dipermudah,” jelas Chatib Basri, Menteri Keuangan 2013-2014.

Menteri Keuangan tiga periode itu optimis langkah tersebut merupakan upaya terbaik menuntaskan masalah ekonomi biaya tinggi. Ali lantas berhasil meyakinkan sang Presiden. Dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Soeharto, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985. Isinya, sementara waktu Bea dan Cukai ditutup dan fungsinya digantikan oleh Société Générale de Surveillance (SGS) dari Swiss.

Sebuah terapi kejut dilancarkan Ali. Namun, keputusan tersebut bukan datang begitu saja. “Pak Ali adalah sosok yang punya visi sangat jelas, strategi, *leadership*, nyali, determinasi, dan kemampuan menjalankannya setahap demi setahap,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Terobosan fenomenal itu terbukti ampuh. Prosedur ekspor impor menjadi lebih mudah, biaya logistik menurun, dan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai melonjak tinggi. Bea dan Cukai berbenah, dan bisa kembali dipercaya menjalankan tugasnya. Kini institusi tersebut makin bersih dan makin baik. “Keputusan ini adalah sumbangan luar biasa dari Pak Ali Wardhana,” kata Sri Mulyani.

KEKACAUAN DI RUANG KERJA

Birokrat yang satu ini nampaknya tak pernah menyusun kertas-kertas *file*-nya dalam suatu standar tertentu. Seperti diberitakan Kompas pada 7 Desember 1988, pria ini berujar “*I don't have a filing system, I have a piling system* – Saya tidak memiliki sistem pengarsipan, saya hanya punya sistem penumpukan”, ujarnya. Meja di ruang kerja Ali memang seringkali penuh dengan tumpukan kertas laporan, koran, map, serta buku. Ia sendiri suatu kali pernah bercanda dengan menyebut kantornya sebagai “kendang ayam”. Uniknya, di sebuah sudut di ruang kerjanya, terpampang figura kecil bertulis, “*Bless the Mess*” – Berkatalah Kekacauan Ini. Meski ruang kerjanya terkesan selalu berantakan, Ali tak pernah kehilangan selebar pun kertas-kertas kerjanya. Andai pun Ali tak menemukan yang ia cari, maka Nani Gandabrata, sekretaris kepercayaannya, akan sigap dengan *copy* arsip sang Menteri.

Ali Wardhana mempermudah prosedur ekspor dan impor untuk memacu penerimaan dari perdagangan internasional

Foto
Perpusnas

Agar Berkah Minyak Tak Jadi Musibah

Teks Rukmi Hapsari dan Iis Zatinika

Ali Wardhana menyadari betul, kemurahan alam kerap menjadi sumber masalah ketika pengelolaannya tak bijak.

Pembangunan jalan hingga ke pelosok, program listrik masuk desa, irigasi yang mengalirkan air ke pesawahan, implementasi revolusi hijau melalui kegiatan Bimbingan Masyarakat, hingga pendirian SD-SD Inpres dan Puskesmas, adalah daftar panjang warisan pembangunan Orde Baru yang hingga kini masih terasa manfaatnya. Sesungguhnya, semua derap pembangunan fisik dan kesejahteraan sosial itu tak bisa dilepaskan dari sosok Ali Wardhana.

Kontribusi sang Menteri Keuangan tiga periode di era Orde Baru pada penganggaran berbagai program pembangunan yang menyentuh infrastruktur, pangan dan sumber daya manusia itu menjadi penanda, pemikiran,

dan kebijakannya telah menghasilkan dampak berganda. Manfaatnya berkelanjutan, bahkan dirasakan antargenerasi.

Namun, peristiwa yang melatari kebijakan-kebijakan itu pun tak kalah istimewa. Berkah *oil boom* atau lonjakan penerimaan negara akibat perolehan pendapatan negara dari sektor minyak, yang terjadi dua kali, pada 1973 serta 1978, telah mempengaruhi perekonomian Indonesia selama satu dekade. Sebagai pengeksport, Indonesia diujani pemasukan sangat besar karena harga minyak melambung tinggi, yaitu USD3 per barel pada 1973 melonjak tajam menjadi USD30 pada 1978. Produksi minyak Indonesia pada 1977 mencapai 1,68 juta barel per hari, sedangkan konsumsi domestik hanya 300 ribu. Akibatnya, sisa produksi minyak diekspor, sehingga penerimaan negara pun berlimpah.

“Sebagai negara pengeksport minyak, Indonesia bak ketiban durian runtuh saat itu. Pemasukan menjadi berlipat ganda,” ujar Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan. Ia mengomparasi kondisi tersebut dengan yang terjadi pada 2017. Pada saat itu, produksi minyak Indonesia hanya 949 ribu barel per hari dengan konsumsi hingga 1,65 juta barel. “Bisa dibayangkan saat itu, betapa kaya Indonesia dari penerimaan hasil ekspor minyak.”

Hindari *dutch disease*

Namun, saat itu Ali melakukan serangkaian gebrakan yang menghindarkan Indonesia dari fenomena *dutch disease*. Ketika berkah minyak melimpah akibat *oil boom*, justru menjadi musibah. Istilah *dutch disease* sendiri berawal dari penemuan sumber daya alam di negeri Belanda yang semula dianggap berkah, tetapi ternyata secara alamiah, justru menyimpan potensi merusak tatanan perekonomian. Sebelum 1959, perekonomian Belanda

bersumber pada ekspor produk olahan dan pertanian. Ketika menjelang era 60-an ditemukan cadangan gas alam dalam jumlah besar yang mendatangkan devisa besar. Gulden Belanda mengalami penguatan dan memicu *overvalued*. Akibatnya, harga produk olahan dan pertanian menjadi relatif mahal di pasar internasional dan kehilangan daya saing. Hingga pada akhirnya, kinerja kedua sektor ini turun drastis.

“Akhirnya ekspor industri lain di luar sumber daya alam, kehilangan daya saing karena harga yang mahal,” ujar Chatib.

Namun, risiko itu sukses ditepis Ali, sang punggawa anggaran. Marzuki Usman, mantan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi yang juga sempat menjabat Ketua Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam) sekaligus mantan asisten pribadi Ali menceritakan, Departemen Keuangan di bawah pimpinan Ali merumuskan kebijakan yang berhasil menghindarkan Indonesia dari kutukan minyak yang merundung Iran dan Nigeria. “Sebaliknya, Indonesia berhasil menggunakan hasil dari komoditi minyak itu untuk penguatan fondasi ekonomi nasional,” kata Marzuki.

Hal senada juga dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pada Repelita 1, pengeluaran pemerintah saat itu justru dioptimalkan untuk mengembalikan produksi, terutama pangan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. “Jadi saat *oil boom* terjadi, kemiskinan *drop*, kemakmuran dirasakan masyarakat, hingga didirikan Badan Usaha Logistik (Bulog). Pak Ali membuat logistik yang komprehensif serta *fundamental economic management* yang *prudent*, betul-betul strategis serta memikirkan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Menolak berfoya-foya

Berkat strategi Ali, lanjut Sri Mulyani,

Indonesia disebut sebagai salah satu dari sedikit negara yang bisa menghindari *dutch disease*. “Itu adalah jasa Pak Ali yang didukung Pak Widjojo Nitisastro, sang arsitek perekonomian Orde Baru,” ujar Sri Mulyani.

Ali, kata Sri Mulyani telah memperkirakan, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada pendapatan dari minyak. Indonesia harus siap mengantisipasi bila suatu ketika, harga minyak terpuruk. Ali menyadari betul, kekayaan sumber daya alam secara teori akan menunjang pertumbuhan ekonomi, tapi justru, negara yang kaya potensi juga kerap gagal bertumbuh.

“Pak Ali mampu mengelola penerimaan negara yang tiba-tiba melonjak tinggi untuk belanja yang produktif. Padahal, negara-negara lain berpesta pora, membangun segala macam, menaikkan gaji, akhirnya sektor *non tradeable* atau barang dan jasa yang dikonsumsi di pasar lokal, justru tidak maju,” ujar Sri Mulyani.

Genjot manufaktur

Chatib Basri juga menyoroti langkah strategis Ali untuk mengantisipasi kondisi nilai tukar rupiah agar terhindar dari *over valued* yang terlalu kuat. Salah satunya dengan melakukan devaluasi. Langkah Ali lainnya yang juga patut diapresiasi ialah dukungan penuh pada industri manufaktur. Ali membenahi tata kelola pemerintahan sehingga lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

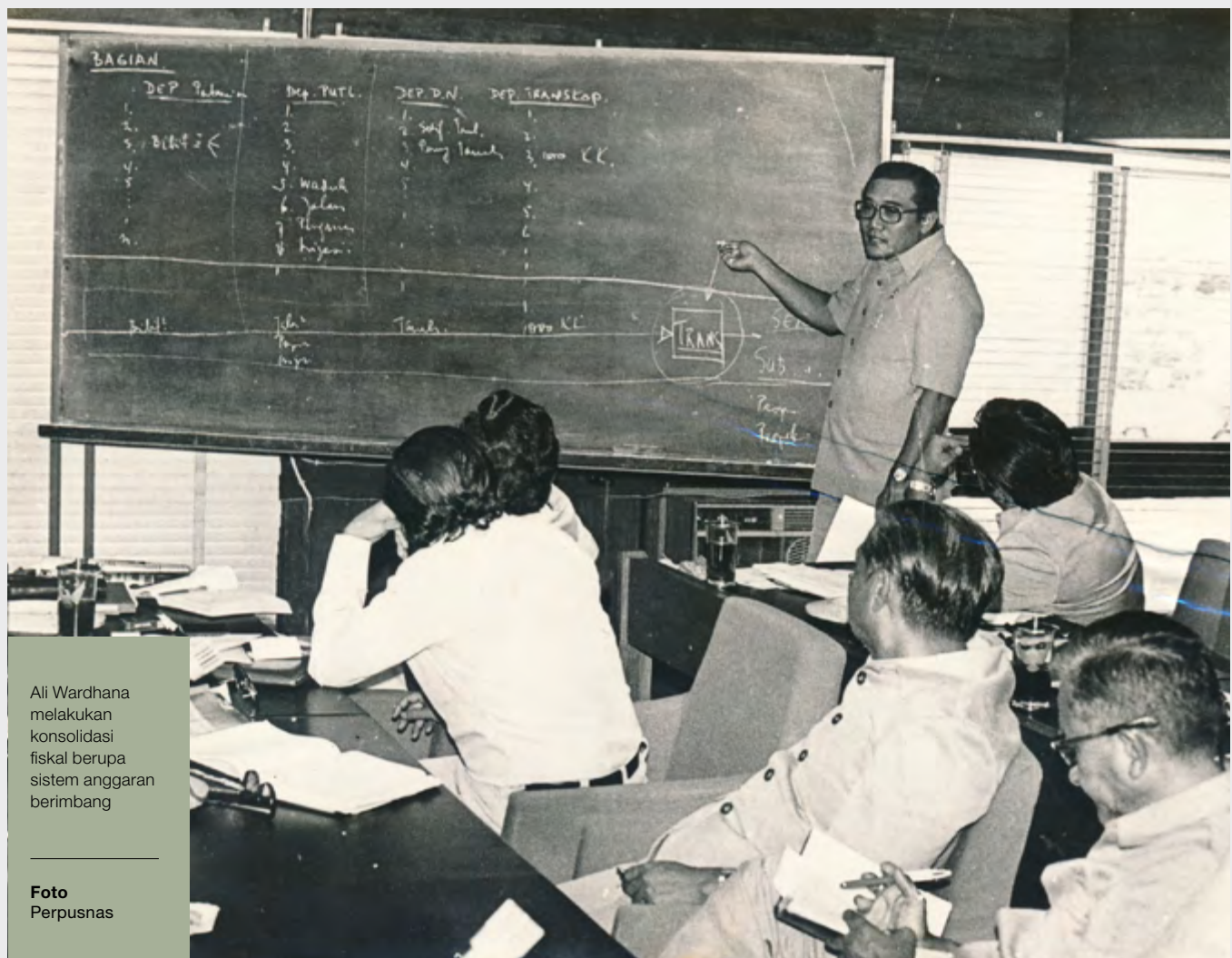
Strategi itu diwujudkan Ali melalui rangkain kebijakan yang mempermudah prosedur ekspor dan impor. Selain itu, Ali juga melakukan penurunan biaya logistik, serta memacu penerimaan dari perdagangan internasional. “Semua bertujuan agar berkah minyak itu menjadi motor pembangunan sektor industri,” kata Chatib.

Berimbang Dahulu, Bertumbuh Kemudian

Teks Rukmi Hapsari dan Iis Zatnika

Gebrakan Ali Wardhana pada APBN, menegosiasikan utang dan merintis kebijakan berimbang, sukses mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Bung Karno tersenyum, nasionalisme terbakar dan Indonesia pun berbangga! Selain sukses menyelenggaraan Asian Games, pesta olahraga se-Asia pada 1967, atlet-atlet nasional berhasil meraih 51 medali, menempatkan negara ini di peringkat kedua setelah Jepang. Gelora Senayan, kini Gelora Bung Karno, yang berdiri megah menjadi saksi kebanggaan Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertandingan yang melibatkan 15 negara.



Ali Wardhana melakukan konsolidasi fiskal berupa sistem anggaran berimbang

Foto
Perpusnas

Indonesia pada era Orde Lama, menjalankan politik mercusuar nan agresif, memupuk nasionalisme dan pengakuan internasional dengan berbagai proyek fenomenal, berwujud aneka bangunan monumental seperti Hotel Indonesia, Monumen Nasional, termasuk kompleks Gelora Senayan, hingga kegiatan yang mencuri perhatian dunia.

Kebanggaan yang menyulut nasionalisme bangsa itu, bagi Ali Wardhana yang menjabat Menteri Keuangan saat Orde Baru berkuasa pada 1968, menyisakan tantangan. Proyek-proyek yang mengukuhkan nasionalisme, kedaulatan dan keamanan teritorial Orde Lama yang butuh banyak ongkos, diwariskan Orde Lama dalam wujud APBN yang sarat defisit.

“Saat itu fiskal dilakukan secara *unlimited*. jangan lupa Presiden Soekarno waktu itu melakukan politik yang sangat *heavy* kepada masalah *security* termasuk konfrontasi, dengan Belanda karena Papua, juga dengan Malaysia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Buat mendanai kepentingan itu, Indonesia mendapatkan pinjaman dari Uni Soviet dan China untuk membeli peralatan militer, setelah sebelumnya mendapat kredit dari Amerika Serikat. “Semuanya butuh biaya, tapi penerimaan pajak tidak cukup, begitu pula dari minyak,” kata Sri Mulyani.

Akibatnya jumlah uang yang beredar jauh lebih besar dari kemampuan produksi nasional, angka inflasi saat itu, menurut mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, menyentuh angka 650 persen. Pembenahan pun dilakukan Ali berduet dengan Widjojo Nitisastro, sang arsitek perekonomian Indonesia, yang sama-sama duduk di kabinet sepanjang tiga periode.

Renegosiasi utang nan legendaris

Ali dan tim kabinet ekonomi

Indonesia saat itu melakukan stabilitasi ekonomi, salah satunya dengan menegosiasikan ulang pembayaran utang, kesuksesan strategi duet Ali dan Widjojo ini, hingga sekarang, dinilai sangat legendaris. “Kita nggak tahu berapa utang saat itu dan pinjam ke siapa saja. Utangnya banyak sekali, karena pemerintah memang tidak punya uang. Renegosiasi itu yang disebut Paris Club. Indonesia menjadi negara yang mampu mendapatkan skema penundaan pembayaran utang yang luar biasa sangat lunak. Utang Indonesia ditunda hampir 45 tahun dengan bunga nol persen,” ujar Sri Mulyani.

Senada dengan Sri Mulyani, Chatib Basri, Menteri Keuangan 2013-2014, menegaskan konsolidasi fiskal yang dilakukan Ali merupakan implementasi sistem anggaran berimbang. “Walaupun anggaran diseimbangkan dari utang, dari Bank Dunia dan lembaga lainnya. Namun, karena pinjaman luar negeri, nggak ada efek kontraksi di dalam negeri. Berbeda dengan pembiayaan dari pajak. Ada uang masyarakat yang diambil,” ujar Chatib.

Keputusan untuk menentukan postur APBN, yang merupakan diskresi pemerintah, akan menentukan apakah akan bersifat defisit, surplus atau berimbang. Kebijakan defisit ditandai kebutuhan fiskal yang direncanakan APBN lebih tinggi dari kapasitas yang dapat dihimpun, sehingga pemerintah membutuhkan sumber pendanaan baru, dalam bentuk pinjaman atau hibah. Kebijakan defisit bersifat ekspansif, mendorong ekonomi agar mampu tumbuh. Saat ini Indonesia mengaplikasikan kebijakan defisit dalam postur APBN-nya.

Kebalikannya, kebijakan surplus, ketika kapasitas fiskal yang dihimpun lebih besar dari kebutuhan APBN. Kebijakan ini bersifat kontraktif, melambatkan pertumbuhan ekonomi untuk menghindari *overheating*

perekonomian. Sedangkan kebijakan APBN berimbang yang diimplementasikan Ali, menempatkan kebutuhan fiskal sama besar dengan kapasitas yang dihimpun. Kebijakan APBN berimbang Ali sukses menurunkan inflasi dari 650% menjadi 20% dalam tiga tahun masa jabatannya.

Ada penerimaan, ada belanja

Peranti fiskal dipakai untuk distribusi dan alokasi pembangunan. “Ali Wardhana bisa dikatakan sebagai menteri keuangan pertama yang membangun fondasi disiplin kebijakan fiskal,” ujar Chatib. Artinya, sebagai menteri keuangan, Ali hanya mau membelanjakan anggaran jika disertai penerimaan yang *legitimate*.

Usai persoalan utang dan inflasi dibenahi, Ali membangun fondasi ekonomi baru. Pendekatan makro ekonomi terutama fiskal dan moneter, dilakukan disiplin. “Karena sebelumnya, kalau dilihat fiskal dan moneter yang cetak uang terus menerus jadi sumber terhadap destabilisasi dan rusaknya ekonomi,” ujar Sri Mulyani.

Derap pembangunan pun dimulai

Strategi Ali dan tim ekonomi lainnya pun berdampak. APBN berimbang mendukung pertumbuhan, mendorong sektor produksi, terutama pertanian yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tak hanya itu, APBN juga mendorong pembangunan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, hingga program keluarga berencana yang saat itu sangat penting

“Pada jaman Widjojo dan Ali inilah pembangunan ekonomi Indonesia dilakukan dengan prinsip- *prudent*, fokus pada hal fundamental. Artinya kebijakan keuangan terutama fiskal dan moneter harus mampu menciptakan fondasi stabilitas, agar ekonomi tumbuh,” ujar Sri Mulyani.

Penakluk Hiperinflasi

Teks Moh. Farhan Zuhri dan Iis Zatrika

Usia muda bukan berarti tak punya taji untuk menata ekonomi. Dua tahun saja angka inflasi yang fantatis dipangkas, ditebus dengan perubahan-perubahan besar pada kebijakan ekonomi.

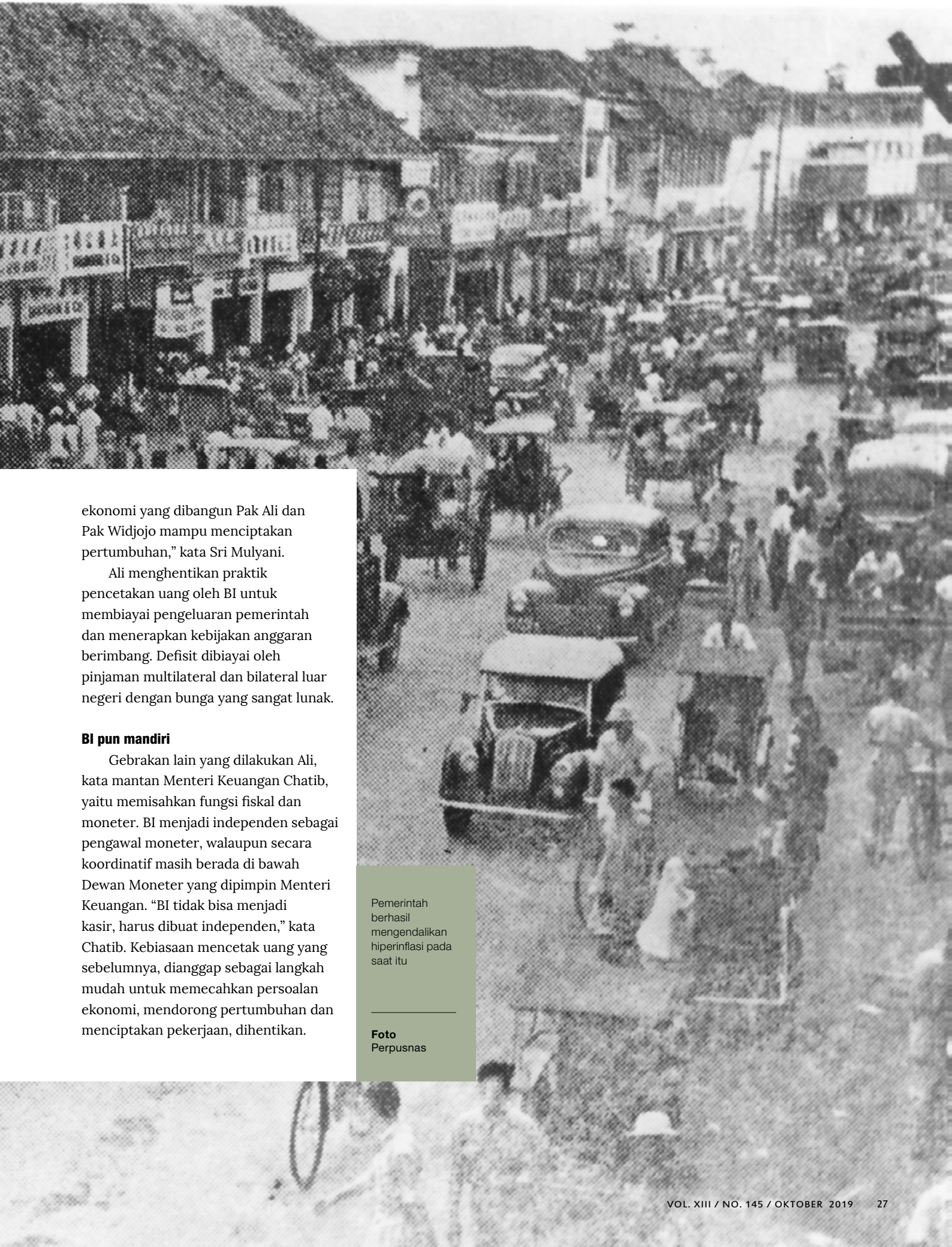
Topik inflasi yang mencapai 650 persen mengemuka dalam suatu rapat kabinet pada tahun 1968. Rapat yang rutin diselenggarakan setiap Selasa itu dipimpin langsung oleh Presiden Soeharto. Ali Wardhana sang Menteri Keuangan saat itu meminta Marzuki Usman untuk menyiapkan laporan kondisi keuangan negara. Marzuki yang baru saja lulus dari Universitas Gadjah Mada dengan sigap merampungkannya. Termasuk di dalam laporan adalah seputar angka inflasi yang super tinggi.

"Pak Ali meminta saya mengkoordinir bahan-bahan yang akan dibahas. Saat itu memang metode pengukuran belum secanggih seperti saat ini, data juga lebih banyak diambil dari Jakarta karena kondisi daerah lain belum memungkinkan diambil angkanya. Namun, Pak Ali memutuskan hasil data itu representatif," kenang Marzuki, mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang saat itu menjadi asisten pribadi Ali.

Keguncangan finansial pada era pemerintahan sebelumnya menyisakan masalah. Negara butuh ongkos tinggi untuk membiayai pembangunan mercusuar dan berbagai kepentingan non-ekonomi. Bank Indonesia (BI) yang saat itu sebagai bagian dari pemerintahan diminta jadi solusi. Pemerintah masih bisa dengan leluasa memerintahkan BI mencetak uang guna mendanai kebutuhan negara. Disinyalir, hal ini pula yang menjadi salah satu pemicu utama serbuan hiperinflasi.

Ali yang saat itu masih sangat muda, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena belum genap berusia 40 tahun saat bergabung dengan kabinet, membuktikan kinerjanya. "Saat beliau menjabat, usinya jauh lebih muda daripada saya. Namun, bersama Pak Widjojo Nitisastro, sang arsitek ekonomi Indonesia di era Orde Baru, Pak Ali berhasil menyelamatkan Indonesia yang kondisinya serba sulit," ujar Sri Mulyani.

Upaya pengendalian hiperinflasi sesungguhnya sudah dilakukan sebelum Ali menjabat menteri. Pada tahun 1967 ia masuk ke dalam Tim Ahli Ekonomi yang dibentuk khusus oleh Presiden Soeharto. Berbagai kebijakan strategis yang dibuat kemudian sukses memangkas laju inflasi hingga berhasil diturunkan menjadi 112 persen pada 1967. Setahun kemudian, menjadi 85 persen dan menukik tajam hingga 10 persen pada 1969. Perekonomian nasional pun kembali berdenyut. "Sebelumnya, bahkan pertanian, andalan Indonesia yaitu sektor perekonomian mengalami kemerosotan. Fondasi



ekonomi yang dibangun Pak Ali dan Pak Widjojo mampu menciptakan pertumbuhan,” kata Sri Mulyani.

Ali menghentikan praktik pencetakan uang oleh BI untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan menerapkan kebijakan anggaran berimbang. Defisit dibiayai oleh pinjaman multilateral dan bilateral luar negeri dengan bunga yang sangat lunak.

BI pun mandiri

Gebrakan lain yang dilakukan Ali, kata mantan Menteri Keuangan Chatib, yaitu memisahkan fungsi fiskal dan moneter. BI menjadi independen sebagai pengawal moneter, walaupun secara koordinatif masih berada di bawah Dewan Moneter yang dipimpin Menteri Keuangan. “BI tidak bisa menjadi kasir, harus dibuat independen,” kata Chatib. Kebiasaan mencetak uang yang sebelumnya, dianggap sebagai langkah mudah untuk memecahkan persoalan ekonomi, mendorong pertumbuhan dan menciptakan pekerjaan, dihentikan.

Pemerintah berhasil mengendalikan hiperinflasi pada saat itu

Foto
Perpusnas



Pemerintah berhasil mengendalikan hiperinflasi pada saat itu

Foto Perpusnas

”

“Sebagai Menteri Keuangan, Pak Ali berupaya seoptimal mungkin melaksanakan kebijakan yang dinilainya baik seperti liberalisasi, pasar bebas, dan penguatan aturan serta institusi.”

Strategi itu, menurut Chatib, menjadi pilihan terbaik, karena pembangunan kemudian bisa berjalan dan menghindarkan kontraksi di dalam negeri karena pendanaan bersumber dari luar negeri.

Langkah Ali lainnya, disiplin anggaran yang dijalankan dengan ketat. “Sehingga kebutuhan domestik terpenuhi, menghapus kemiskinan dan kelaparan, lapangan kerja dibuka dan pemerintah mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Bangun fondasi dasar

Ali juga menginisiasi fondasi dasar kebijakan penganggaran, kebijakan moneter, serta kebijakan nilai tukar yang berfokus pada stabilisasi harga, yaitu tingkat inflasi dan nilai tukar. Program itu tentu tidak mudah, membangun fondasi kebijakan makroekonomi membutuhkan dukungan politik untuk membatasi pengeluaran anggaran dan mengarahkannya pada pengeluaran produktif.

Tantangan lainnya yang sukses dihadapi Ali adalah perubahan struktural. Pada 1970-an dan 1980-an Ali memerankan peranan penting perekonomian Indonesia, ketika kondisi global tidak stabil dan tidak pasti, tantangan muncul dari perubahan sistem standar emas pada sistem nilai

tukar mengambang, kekacauan harga minyak global serta perubahan drastis harga minyak yang naik pada 1970-an yang kemudian turun pada 1980-an.

Pada 1980 dunia juga menghadapi kondisi stagflasi yang dipicu kombinasi antara inflasi dan resesi ekonomi, yang menghasilkan Plaza Accord, perjanjian yang dihasilkan dari depresiasi dolar AS terhadap nilai tukar Jepang, Jerman, dan Inggris. Situasi global memengaruhi Indonesia karena ketergantungan tinggi terhadap minyak sebagai sumber keuangan negara dan ekonomi, juga intensnya hubungan perdagangan dan investasi dengan Jepang dan Amerika Serikat.

Ali pun memberlakukan kurs mengambang terkendali yang ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah, sebesar 33 persen, pada 1978. Pada sistem ini, nilai tukar rupiah diambangkan terhadap sekeranjang

mata uang negara-negara mitra dagang utama Indonesia. BI menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan rentang atau *spread* tertentu. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut, meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang, tetapi tetap masih ada unsur pengendalian.

Pada saat sistem nilai tukar mengambang terkendali ini diterapkan di Indonesia, nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi terhadap dolar AS antara Rp650/USD sampai Rp2.500/USD. “Kita membolehkan terjadi depresiasi, tapi *range*-nya hanya 5 persen. Jadi rupiah selalu bergerak dalam lebih kuat atau lebih lemah dari 5 persen,” ujar Chatib.

Keunggulan mengadopsi kurs mengambang terkendali antara lain mampu menjaga stabilitas moneter dengan lebih fleksibel, adanya aktifitas *demand* dan *supply* dalam pasar valuta asing akan mampu menstabilkan nilai tukar sesuai dengan kondisi ekonomi yang terjadi serta memadukan sistem tetap dan mengambang.

Pembelajarannya, kata Chatib, dampak yang harus diantisipasi, devisa tetap harus selalu tersedia dan siap digunakan sewaktu-waktu. Selain itu, terjadi pula persaingan yang ketat antara pemerintah dan spekulasi dalam memprediksi dan menetapkan kurs. Pun, pemerintah tidak selamanya mampu mengatasi neraca pembayaran atau perdagangan. “Pada 1998 kita *nggak* kuat pada waktu itu karena kalau kita mau coba bikin kurs mengambang terkendali seperti yang di-*adopt* Pak Ali, cadangan devisa kita akan habis. Kan kalau ingin mempertahankan nilai tukar, setiap kali ada permintaan dolar, Anda musti suplai dolar,” ujar Chatib.

Namun, saat Ali memberlakukan kebijakan itu, sistem kurs sukses mengalirkan dampak pada

pertumbuhan, salah satunya industri manufaktur yang terbantu akibat insentif pada impor barang modal. Ekonomi bergerak, industri berderap, dan Indonesia pun bertumbuh.

Mengawal dekade kritis Indonesia

Sri Mulyani menegaskan, Ali sukses melanjutkan disiplin fiskal dan kebijakan moneter selama dua dekade kritis bagi Indonesia. “Dengan mengimplementasikan kebijakan nilai tukar atau devaluasi. Langkah ini dilakukan untuk mempertahankan daya saing, menghilangkan hambatan terhadap pinjaman dan investasi asing. Menteri alumnus Universitas Indonesia dan Universitas Illinois di Urbana-Champaign tersebut mengatakan, “Wujud implementasinya, dilakukan kebijakan yang liberal pada pinjaman yang akan mendukung aktivitas ekspor serta melibatkan industri padat karya.”

Ali pun taktis mengelola penerimaan minyak dan gas bumi untuk mendorong permintaan dan meningkatkan produktivitas. Kombinasi rangkaian kebijakan makro dan kebijakan struktural itu sukses menstabilkan inflasi.

“Sebagai Menteri Keuangan, Pak Ali berupaya seoptimal mungkin melaksanakan kebijakan yang dinilainya baik seperti liberalisasi, pasar bebas, dan penguatan aturan serta institusi. Namun, dalam konteks kekuasaan Orde Baru, dia tidak bebas untuk mengoreksi,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan, sebagai sesama teknokrat di posisi Menteri Keuangan, Ali juga dirinya harus menjawab tiga tantangan yang dipastikan akan dihadapi mereka yang dipercaya mengelola perekonomian suatu negara, baik negara maju maupun berkembang. “Ketiga tantangan itu menentukan ukuran kesuksesan

INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA

Pada masa kepemimpinan Ali Wardhana sebagai Menteri Keuangan, ia telah banyak melakukan gebrakan reformasi termasuk di dalamnya *down sizing* organisasi dan juga yang tak kalah penting adalah investasi sumber daya manusia (*human investment*). Ali memiliki keyakinan bahwa mendidik karyawan bukanlah dianggap sebagai *cost*, akan tetapi merupakan investasi. Rupanya jauh hari, Ali telah menerapkan ide *human investment*. Di masa kepemimpinannya, ia telah mengirimkan banyak staf dan pegawai Departemen Keuangan untuk belajar ke luar negeri guna mendapatkan gelar Master dan Doktor. Peningkatan investasi Sumber Daya Manusia ini dimulai sejak tahun 1973 dengan mengirimkan 2 orang pegawai Departemen Keuangan saat itu untuk menuntut ilmu ke Amerika Serikat.

ekonomi, yaitu kebijakan makro, struktural dan pengembangan institusi. Pak Ali adalah teknokrat yang berkontribusi besar pada perjalanan sejarah perekonomian negeri ini,” ujar Sri.





Ali Wardhana
menjabat
sebagai Menteri
Keuangan
selama 3
periode kabinet
yaitu kabinet
pembangunan
I, II, dan III dari
tahun 1968-
1983.

Foto
Antara

Vokal di Forum Global

Teks Rukmi Hapsari dan Iis Zatrika

Kisah tentang berkah timah di Pulau Belitung yang saat itu menjadi andalan nasional dan mengalami gonjang-ganjing harga akibat Amerika Serikat mengeluarkan stoknya, melatari pidato Ali Wardhana dalam sidang Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional pada 1970. Ali lugas meminta negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat, menjalankan apa yang diucapkan, *walk the talk*.

Ali memaparkan, kondisi stabilitas internal dan eksternal negara-negara maju memang tidak seperti yang diharapkan, akibat inflasi dan pengurangan permintaan. Amerika Serikat pun mengantisipasi dengan





Pergerakan
Ali Wardhana
di kancah
internasional
mempengaruhi
arus investasi
Indonesia

Foto
Perpusnas

“Ali dan kawan-kawan adalah putera-putera bangsa yang berjuang di lingkup internasional menyuarakan suara hati dan kepentingan negara-negara berkembang,”

mengeluarkan stok komoditasnya, sehingga harga timah dan karet dunia pun merosot.

“Kami telah minta agar langkah itu dimoderasi. Sebagai negara berkembang, kami selalu didorong mengurangi sumber pendanaan dari luar, namun di saat yang sama kapasitas juga dikurangi,” kata Ali yang menegaskan, tuntutan bahwa negara-negara berkembang harus menstabilkan perekonomiannya sangat bergantung pada dukungan global.

Berwibawa Karena Prestasi

Langkah penuh strategi dan ketegasan Ali memang bukan cuma diterapkan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan selama 15 tahun, melainkan juga di tataran internasional. Emil Salim, koleganya dalam kabinet Orde Baru memaparkan istimewanya sosok Ali hingga dipercaya menjadi Dewan Gubernur Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional pada 1971-1972. Padahal sebelumnya, pimpinan lembaga-lembaga internasional itu dipimpin oleh orang Eropa Barat.

“Salah satu hasil kerja Ali yang menjadikannya dipercaya masyarakat internasional adalah keberhasilan menurunkan inflasi yang pada 1965 mencapai 650 persen menjadi 15 persen pada 1968,” kata Emil Salim, ekonom yang juga mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Selama sidang, Ali tampil lantang di depan para pimpinan negara dunia di tengah kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak. Ia tegas menyikapi langkah Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat yang melepaskan Dolar dari standar emas yang saat itu ditentukan USD35 per ons sehingga berdampak hebat bagi tataran global. “Keputusan itu diambil dengan mengabaikan dampaknya pada dunia internasional, khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana menentukan nilai tukar antara mata uang negara-negara di dunia,” ujar Emil.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman dan Jepang yang kemudian berunding tentang antisipasi yang akan mereka lakukan, bernegosiasi secara eksklusif. Negara-negara berkembang tidak dilibatkan dalam forum tersebut. Bahkan, ketika Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Departemen Keuangan Amerika Serikat merumuskan Washington Concensus, Indonesia dan pimpinan negara-negara yang jadi sasaran justru tidak dilibatkan. Padahal, konsensus itu berisi 10 formula untuk mengatasi krisis ekonomi negara berkembang

Kesetaraan untuk Bertumbuh

Dalam sidang Dewan Gubernur Bank Dunia, Ali kemudian mempertanyakan ketidaksetaraan itu. Ia menegaskan, agar negara berkembang bisa tumbuh harus ada kesempatan yang

sama seperti yang didapat bangsa yang telah maju, termasuk terkait hak atas kekayaan intelektual.

Ali, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga berkiprah di Bank Dunia sebagai Direktur Pelaksana pada 2010 hingga 2016, sangat dihormati para ekonom internasional karena tidak hanya lugas menyuarakan kepentingan Indonesia semata, tetapi juga negara-negara berkembang lainnya. “Negara-negara yang sesudah meraih kemerdekaan lalu jatuh miskin dan sering harus bernegosiasi alot pada dunia internasional,” ujar Sri Mulyani.

Perjuangan yang dilakukan Ali tersebut, kata Sri Mulyani, menjadi gambaran, bagaimana seorang teknokrat memaksimalkan seluruh kapasitasnya, termasuk kepemimpinan manajerial dalam bernegosiasi.

Emil menambahkan, pemikiran strategis Ali juga berpadu dengan nyali yang besar. Pada persidangan yang dihadiri pemimpin dan menteri-menteri keuangan dari berbagai negara, Ali menyuarakan argumentasinya. “Tanpa *playing field* yang sama, bagaimana *growth* negara-negara berkembang bisa dicapai, apalagi *growth with equity*? Ali menegaskan, beri negara berkembang kesempatan yang sama dan adil sebagaimana diperoleh bangsa maju, baru *growth with equity* tercapai,” kata Emil.

Tantangan eksternal itu berpadu dengan kondisi internal Indonesia yang pada masa itu sangat mengedepankan nasionalisme. Dalam pidato-pidatonya, Ali tegas memaparkan betapa beratnya usaha meloloskan diri dari tekanan rumusan kebijakan negara-negara maju.

Ali saat itu menuntut persamaan tidak hanya berbentuk investasi fisik, seperti modal, mesin dan teknologi. Ia juga meminta hak yang sama pada aspek pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesehatan manusia dan masyarakat serta usaha mengentaskan

kemiskinan dan mengikis ketimpangan.

Kiprah Para Diplomat Ekonomi

Keberanian Ali menjadi bagian dari pencapaian tim delegasi Indonesia untuk memperjuangkan diplomasi ekonomi di tingkat global. Selain Ali, ada pula Widjojo Nitisastro, Kepala Bappenas yang memimpin tim ekonomi South Center, lembaga yang memproklamirkan diri sebagai kekuatan penyeimbang melalui OPEC. Sementara di organisasi pengekspor minyak itu sendiri, Indonesia diwakili Soebroto sebagai Sekretaris Jenderal.

Indonesia memberdayakan ekonom-ekonom terbaiknya mengimbangi kekuatan Washington Consensus serta tekanan-tekanan negara maju lainnya. “Ali dan kawan-kawan adalah putera-putera bangsa yang berjuang di lingkup internasional menyuarakan suara hati dan kepentingan negara-negara berkembang,” kata Emil.

Berwujud The Jamaican Agreement

Salah satu rangkaian perjuangan Ali berwujud The Jamaican Agreement, yang ia motori dan kemudian ditandatangani Dewan Gubernur Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional pada 1976, di Kingston, Jamaica. Isinya, pengaturan tahap pertama dalam reformasi sistem moneter internasional yang memungkinkan kredit dengan bunga terjangkau bagi negara berkembang.

Dasar pemikiran perjanjian itu, kesempatan negara berkembang untuk bertumbuh sudah sulit karena bangsa-bangsa maju sudah memangkas bantuan lunaknya. Promosi investasi pun mensyaratkan imbal hasil yang sama dari perolehan di negara maju.

“Arifin Siregar, kolega di kabinet yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia menyatakan selama empat tahun pembahasan dan perundingan

hingga *agreement* itu tercapai, Ali memperlihatkan kemampuan memimpin, mengarahkan, dan menyatukan beraneka pendapat para peserta perundingan,” ujar Marzuki Usman, mantan Ketua Bapepam, sekaligus mantan asisten pribadi Ali.

Merintis IDB

Jejak Ali di tataran internasional lainnya juga tertoreh dalam proses pendirian Islamic Development Bank (IDB) yang berpusat di Jeddah, Saudi Arabia. Saat itu, pada 1975, sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) bersepakat mendirikan IDB, sehingga diperlukan rancangan Anggaran Dasar atau The Statement of Establishment.

Marzuki Usman mengutip kisah Karnaen A Perwataatmadja, mantan Direktur Eksekutif IDB. Sidang OKI saat itu dipimpin Menteri Keuangan Saudi Arabia dan Ali menjadi wakilnya. Rancangan itu merupakan dokumen penting sehingga persidangan alot karena pembahasan bertele-tele. “Namun, ketika Menteri Keuangan Saudi Arabia kembali ke Riyadh karena dipanggil rajanya dan Ali mengambil alih, sidang justru berjalan lancar,” ujar Marzuki Usman.

Pasal demi pasal dari anggaran dasar dibahas tuntas hari itu. Sehingga, di akhir sidang, para peserta memberikan selamat pada Ali dan mengucapkan terima kasih. Apresiasi juga diberikan Presiden IDB Dr Ahmed Muhammed Ali Al Madani. Ia sangat mengapresiasi sikap taktis Ali sehingga setiap kali bertandang ke Jakarta, selalu menyempatkan bertemu Ali.

Tolak Pujian Tanpa Justifikasi

Kelugasan Ali di tataran internasional, juga diperlihatkan ketika ia tegas menolak Indonesia dimasukkan dalam daftar delapan negara berkategori The Asian Miracle karena dianggap mencapai peningkatan ekonomi

secara dramatis, bersama Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Thailand serta Malaysia. Keajaiban yang dimaksud adalah GDP per kapita naik dua kali lipat seperti halnya grup regional lain pada 1965 dan 1990, serta penurunan yang signifikan pada kemiskinan dan kesenjangan pendapatan secara berkala.

Ali saat itu mengoreksi, sebutan keajaiban seharusnya hanya disematkan pada negara dengan industri manufaktur yang menggembirakan. “Tidak ada *miracle* jika negara tidak mampu membangun industri non migas sebagai tumpuan pertumbuhan yang menyerap tenaga kerja dan menyumbang ekspor. Ali menegaskan, Indonesia bukan negara yang bisa disebut *miracle* saat itu,” ujar Emil.

Ali selalu berprinsip, lebih baik jujur daripada membohongi diri tentang prestasi yang sesungguhnya tidak nyata. “Ali berucap, Bank Dunia dan dunia internasional itu suka memuji. Di Hongkong, disebut-sebut The Asian Miracle, Thailand saat itu dipuji-puji. Namun, tiga bulan kemudian, jebol. Ali berpendapat, harus ada justifikasi kuat, lebih baik tidak menjilat, walaupun mungkin menyakitkan. Itu adalah bukti integritas Ali”, kata Emil.

Kredit Terjangkau, Investasi Berdatangan

Berbagai pergerakan Ali di kancah internasional, kata Sri Mulyani, selain kemudian berdampak pada interaksi antara negara maju dan berkembang, termasuk aliran kredit dengan bunga lebih terjangkau yang menggerakkan pembangunan, juga mempengaruhi secara langsung arus investasi Indonesia.

“Pak Ali banyak menggunakan ide-ide dan *best practise* internasional. Itu sebabnya sejak 1970, reformasi luar biasa banyak, sehingga investasi masuk dan ditunjang juga dengan Undang Undang No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta fondasi stabilisasi produksi,” ujar Sri Mulyani.

Mengenal Sisi Personal Sang Legenda

Teks Farida Rosadi

Tidak ada lagi aktivitas yang bisa ditemui pada rumah di kawasan Patra Kuningan Blok XV bernomor enam itu. Rumah yang jauh dari kesan mewah karena berdekatan dengan perkampungan warga dan pedagang kaki lima itu, memang telah lama sepi. Terlebih, semenjak ditinggal wafat sang pemilik rumah, Ali Wardhana.

Sebelum tutup usia pada 2015, Ali menghabiskan masa tuanya di rumah tersebut sejak 1990-an. Isyana Ika yang merupakan putri pertama Ali, berkenan merawat sang ayah hingga akhir usia. Apalagi, kekasih hati Ali, Rendasih, telah lebih dulu wafat pada 2000 silam. Uniknya, belum setahun ditinggal sang ayah, Ika menyusul berpulang. Tepat di hari ulang tahun Ali Wardhana pada 6 Mei 2016.

Cerdas sedari kecil

Puluhan tahun sebelumnya, Kota Solo menjadi saksi lahirnya teknokrat kebanggaan Indonesia. Siapa sangka, anak lelaki itu kelak dikenang sebagai maestro ekonomi andal lagi disegani. Kebijakannya diakui relevan, tak hanya pada zamannya, tetapi juga bertahun-tahun setelahnya. Dialah Ali Wardhana.

Ali lahir di kota Solo pada 6 Mei 1928. Belum genap berusia lima tahun, Ali kecil ditinggal wafat sang ibu.



Beruntung, kasih sayang ibu kembali dirasakan Ali tatkala sang ayah, Aliman, menikah kembali dengan bulik, adik dari ibu Ali.

Semasa belia, Ali tak mengenyam pendidikan formal. Melalui *bulik* yang juga merupakan ibu tirinya, Ali belajar di rumah. Pada masa itu, kecerdasan Ali telah nampak. Terbukti, begitu dimasukkan ke sekolah formal, Ali langsung ditempatkan di kelas V Sekolah Rakyat (sekarang sekolah dasar).



Ali bersama
istri dan putra
putrinya

Foto
Dok. Pribadi

Masa kecil Ali dihabiskan di Kota Solo. Mahendra, putra kedua Ali menyebutkan, sang ayah sempat beberapa kali berpindah tempat tinggal. Ali sempat menumpang di rumah salah seorang paman yang juga merupakan tokoh nasional, Ali Sastroamidjojo. Menurut pengakuan Mahendra, rumah masa kecil Ali di Solo, saat ini telah menjadi pertokoan.

Bukan yang pertama

Tidak banyak yang tahu, bidang ekonomi bukanlah pilihan pertama Ali melanjutkan studi. Sebelum berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Ali remaja sempat menekuni jurusan kedokteran setahun lamanya. Apa daya, keterbatasan biaya jadi musabab mundurnya Ali dari fakultas yang hingga kini dikenal berbiaya mahal itu. Apalagi, kedua orang tua Ali tak lagi menyokong kebutuhan kuliahnya. Ali

diminta untuk mandiri.

Tak menunggu waktu lama, Ali memutar haluan. Kali ini, bidang ekonomi jadi pilihan. Apa pasal? "(Salah satunya) karena jurusan ekonomilah yang menyediakan beasiswa," jelas Mahendra. Meski mengantongi beasiswa, Ali masih perlu bekerja sampingan. Diceritakan Ganesha, menantu Ali, sembari kuliah, Ali bekerja paruh waktu pada kantor penyedia jasa travel.



Ali Wardhana
pada saat acara
pernikahannya

Foto
Dok. Pribadi

”

“Setiap malem pas tidur, bapak ngoceh terus. Saya gak ngerti ngoceh apa. Baru sekarang saya tahu betapa stresnya bapak”

Bertemu cinta

Tidak satupun dari Mahendra maupun Ganesha yang tahu secara pasti, bagaimana kisah perkenalan Ali dengan Rendasih, sang istri. Rendasih adalah gadis asal Bandung yang berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak. Tidak jarang Rendasih muncul di program acara anak-anak yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia (RRI) saat itu. Barangkali, kesamaan jiwa pendidik diantara keduanya menjadi sebab Ali jatuh hati.

Diceritakan Ganesha, Rendasih banyak membantu Ali pada masa-masa awal pernikahan. “Justru Ibu sebagai guru TK membantu bapak. Meskipun bapak juga kerja di *travel*, tapi pendapatan ibu yang membuat dapur mengepul,” ungkapnya. Meski demikian, kegigihan Ali patut jadi teladan. Bahkan semasa di kampus, kesibukan Ali tak melulu berkutat pada tugas kuliah.

Bersama rekannya J.B. Sumarlin, Ali yang masih berstatus mahasiswa dipercaya menjadi asisten dosen pada mata kuliah berbeda. “Pak Ali (asisten dosen) moneter, saya menjadi asisten (dosen) keuangan negara. Dosennya sama,” tutur Sumarlin. Tak hanya bersama-sama menjalani asisten dosen, kedua sejawat itu juga bersama-sama menamatkan kuliahnya di FEUI pada 1958.

Diceritakan Ganesha, kehidupan Ali berangsur membaik tatkala lulus sarjana. Karena kecerdasannya, Ali yang saat itu telah menjadi dosen UI, diberangkatkan ke luar negeri guna melanjutkan studi. Ali melanjutkan pendidikan masternya di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Segala ongkos pendidikannya saat itu dibiayai penuh melalui beasiswa yang diperolehnya dari Ford Foundation. “(Saat itu,

baru segala sesuatunya lebih (baik),” ungkap Ganesha.

Kuliah bersama keluarga

Ali memboyong serta istri dan putri pertamanya, Ika, yang masih berusia balita. Selama di Amerika, Ali berhasil merampungkan bukan hanya program masternya, melainkan juga program doktoralnya. Gelar Master of Arts diperoleh Ali pada 1961. Sementara setahun setelahnya, Ali berhasil meraih gelar Ph.D pada 1962.

Menjalani pendidikan di negeri orang bukanlah perkara gampang. Beruntung Ali ditopang kawan-kawan senasib sepenanggungan. Salah satunya, J.B. Sumarlin yang juga beroleh beasiswa. Bak *baby sitter*, Sumarlin mengaku, dirinya beberapa kali dimintai bantuan untuk mengurus putri pertama Ali. “Itu Ika, anaknya Pak Ali, dulu (sewaktu) bayi, saya yang momong,” katanya.

Maklum saja, kala itu Sumarlin masih berstatus bujang. Bukan hanya Ali, Sumarlin juga tak segan membantu rekan-rekan lain, seperti Emil Salim, yang juga tengah menyelesaikan

pendidikan di kampus yang sama. Saat masih di negeri Paman Sam itulah, Ali dikaruniai putra kedua yang diberi nama Mahendra.

Teknokrat Ingusan

Ali didapuk menjadi Dekan FEUI pada 1967, menggantikan senior sekaligus sahabatnya, Widjojo Nitisastro. Siapa sangka, amanah sebagai Dekan FEUI mampu dijalankan Ali dengan begitu baik hingga sepuluh tahun setelahnya. Kurang dari satu tahun menjabat sebagai dekan, Ali yang belum genap berusia 40 tahun dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Sejarah mencatat, Ali bukan hanya dikenal sebagai Menteri Keuangan termuda, melainkan juga yang termuda di kalangan menteri-menteri lainnya di kabinet. Beberapa media bahkan menyematkan sebutan ‘menteri ingusan’ kepada Ali.

Meski sempat gentar di awal, Presiden Soeharto kala itu mampu meyakinkan Ali. “Pak Harto bilang, saya juga belum pernah jadi presiden, Bung Ali juga belum pernah jadi menteri, jadi kita sama-sama belajar,” demikian Mahendra menirukan cerita sang ayah. Ali pun akhirnya bersedia melaksanakan tugas yang tidak ringan itu. Bahkan selama tiga periode kepemimpinan Soeharto.

Ayahku menteri

Hal pertama yang dilakukan Ali tak lama menjabat sebagai menteri adalah memberikan ‘ultimatum’ kepada keluarganya. “Yang ada (itu) menteri. Tidak ada yang namanya ibu menteri, tidak ada yang namanya anak menteri,” ucap Ali seperti dituturkan Mahendra. “Itu pula sebabnya, selama sekian tahun bapak menjabat, saya ke lapangan banteng (kantor Kemenkeu) bisa dihitung pakai jari,” kenangnya.

Saking tidak pernah direpotkan, jajaran pejabat di bawah Ali bersedia menjadi panitia pernikahan putri

pertama Ali. Direktur Jenderal Pajak kala itu, Sutadi Sukarya, bahkan secara sukarela berinisiatif menjadi ketua panitia. “Dia (Suardi) cerita ke saya, sebetulnya bapak *gak* minta dirjennya jadi anggota panitia. Cuma mereka *volunteer* untuk itu,” ujar Mehendra. Sewaktu ditanya, sang dirjen mengaku itu jadi kali pertama mereka membantu Ali di luar tugasnya. “Sebab (selama ini), mereka kerja tidak pernah digercoki anak menteri,” sebutnya.

Kedadaan ekonomi yang carut marut pada awal Ali menjabat, sudah barang tentu jadi tantangan besar. Meski tidak pernah membawa masalah pekerjaan ke rumah, beratnya beban yang dipikul Ali rupanya bisa dirasakan oleh anak-anaknya. Mahendra mengisahkan, pada masa awal-awal bertugas, inflasi yang menyentuh angka ratusan membuat sang ayah tidak bisa tidur nyenyak.

“Setiap malem pas tidur, bapak ngoceh terus. Saya *gak ngerti* ngoceh apa. Baru sekarang saya tahu betapa stresnya bapak,” kenangnya. Sebagai anak yang masih belia, Mahendra cukup trauma mendengar igauan sang ayah setiap malam. Kala itu, Rendasih terbiasa menggilir putra-putrinya untuk bisa tidur bersama.

Tidak ada hal istimewa yang berbeda sebelum dan sesudah Ali menjabat sebagai menteri. Kecuali, terkait penjagaan khusus yang diberikan kepada Ali di kediamannya. Mahendra menceritakan, bukannya senang, sang ibu, Rendasih justru protes. “Sebab gak ada uang untuk memberi (para penjaga) itu makan,” kisahnya seraya tergelak. Oleh karena protes sang istri, dari sekian banyak penjaga, hanya sedikit yang masih bertahan.

Tegas tanpa fasilitas

Bersama Rendasih, Ali dikaruniai empat orang anak. Mereka adalah Isyana Ika Wardhana, Mahendra Wardhana, Pradjanawita Wardhana, dan Pradjanamita Wardhana. Kepada anak-

INGIN JADI PEDAGANG DURIAN

Di luar dugaan, teknokrat yang dikenal tegas namun tetap humoris ini ternyata juga memiliki kebun durian dan hobi berkebun. Kebun duriannya terletak di Ciputat, Jakarta Selatan dimana dahulu dia mengembangkan tanaman durian Bangkok sebanyak 150 pohon. Selain durian, ia juga menanam buah cangkakan yang lain seperti mangga arum manis, simanalagi, sawo, dan jambu jamaica. Contoh hasil kebun buahnya bahkan pernah ia berikan kepada Menteri Perminyakan Arab Saudi, Zaki Yamani. Sampai-sampai beliau suka bergurau kepada wartawan kalau ia pensiun, ia ingin menjadi pedagang durian saja. Kelakar ini juga sempat diangkat menjadi karikatur di Kompas Minggu dimana karikatur itu memuat gambar Ali Wardhana mengenakan sarung dan berjualan durian. Menurut Ali, berkebun bisa menghilangkan pusing.

anaknya, Ali menularkan sifat mandiri, tanpa boleh menunggangi fasilitas negara. “Mungkin karena pengalaman beliau sendiri terutama saat kehidupan kemahasiswaannya, beliau berusaha sendiri,” ungkap Ganesha. Meski demikian, diakui Mahendra, Ali cukup keras jika menyangkut pendidikan. “Orangnya *strick* sekali, mengenai sekolah dan pendidikan. Malah *strick* cenderung galak,” katanya.



Ali dan istri di kebun durian miliknya.

Foto
Dok. Pribadi

”
“Saya bisa lihat, Bapak agak terpukul, padahal biasanya orangnya tegar,”

Mahendra mengenang, meski dikenal galak dalam hal pendidikan, sang ayah justru memberikan kebebasan kepada anak-anaknya dalam memilih bidang yang diminati. “Dia gak pernah nuntut saya harus jadi apa, adik saya harus jadi apa. Kalau sekolah apapun yang mau diikuti terserah, yang penting yang terbaik. Itu aja prinsipnya,” ujarnya. Semasa muda, Mahendra bahkan pernah memanjangkan rambut mengikuti idolanya, “(Bapak) orangnya agak bebas. Rambut saya pernah agak panjang, dia juga *gak* masalah,” ucapnya.

Begitu pula yang menyangkut karier keempat anaknya. Ali sangat berhati-hati dalam memisahkan kepentingan keluarga dengan kepentingan negara. Meski cukup lama berkarier di pemerintahan, tidak satupun anak-anak Ali mengelola bisnis besar. “Kita karir profesional semua. Kecuali adik,” ujar Mahendra. Saat ini, kedua adik Mahendra berdomisili di luar negeri dan menjalankan bisnis rumahan di bidang *florist* dan *catering*. Sementara dia sendiri memilih berkarier sebagai *bankir* hingga menjelang usia pensiun.

Salah satu kisah menarik dialami Ika selepas lulus dari sekolah di luar negeri. Bukannya mendapat rekomendasi sang

ayah, Ika malah disugukan daftar alamat kantor beserta bank di Jakarta. Sembari tersenyum, Ali meminta putrinya untuk memilih dan melamar sendiri ke kantor-kantor tersebut tanpa secuilpun lembar rekomendasi. Pengalaman serupa nyatanya juga dirasakan Praj Nawita (Wita), anak ketiga Ali. Wita yang saat itu telah diterima sebagai karyawati di sebuah hotel besar terburu-jumawa. Bagaimana tidak? Wita tahu betul, sang ayah mengenal baik pemilik hotel, sehingga dia mengira akan ditempatkan pada tugas istimewa. Namun, apa mau dikata. Wita justru dibiarkan sang ayah berkarier dari bawah sebagai *housekeeping* hotel.

Tegas dan lugas. Demikian Ali mendidik putra dan putrinya. Bagi Ali, sudah selayaknya bekerja dimulai dari bawah. Tidak ada yang langsung instan memperoleh posisi bagus. Ali percaya, pengalaman bekerja dari bawah akan sangat berguna bagi seorang pemimpin karena bisa menguasai permasalahan.

Melakukan hobi bersama

Akhir pekan jadi agenda wajib Ali dengan keluarga. “*Daddy* kl ada di rumah pasti ngumpul sama kita, *gak* pernah *kalo* kita lagi makan atau kumpul, trus dia menghilang,” ungkap Ganesha. Ali juga selalu mengajak istri dan semua anaknya ikut serta dalam kegiatan olahraga.

Kecintaan Ali pada kegiatan olahraga memang begitu besar. Tak heran, meski dilanda tekanan pekerjaan, Ali tetap terlihat bugar. Sumarlin mengungkapkan, Ali begitu bergembira bila memenangkan pertandingan tenis bersamanya. “Yang mau menang terus (ya) Pak Ali. *Kalo* menang, dia puas,” kisah Sumarlin. Kondisi fisik Ali mulai menurun tatkala aktivitas olah raganya berkurang. “Kelihatan setelah *gak* golf, kondisinya langsung turun,” ungkap Mahendra.

Selain menggandrungi olahraga, Ali dikenal begitu menggemari cerutu. Bahkan pada saat sakitnya, Ali sulit meninggalkan kebiasaan yang satu ini. Pernah suatu kali, Mahendra gagal membujuk sang ayah untuk pergi ke rumah sakit. Untungnya, istri Mahendra berhasil merayu ayah mertuanya itu. “Trus (sebelum berangkat) Bapak bilang minta tunggu (karena) mau menghisap lagi cerutunya. (Lalu) sampai di RS, Bapak juga minta cerutu,” kenang Mahendra seraya menggelengkan kepala.

Hal unik lainnya adalah kesenangan Ali menyetir mobil. Setiap kali berangkat main golf di akhir pekan, Ali tidak pernah meminta bantuan sopir. “Bapak berhenti menyetir itu sudah akhir-akhir. Motor juga nyetir sendiri,” ungkap Ganesha. Tak jarang, anak-anaknya tidak tahu-menahu kemana Ali pergi dengan mobilnya. “Waktu (sudah) *gak* bisa nyetir, kesibukan bapak lebih banyak di rumah,” lanjutnya.

Keseharian akhir sang legenda

Hal yang cukup mengguncang Ali adalah peristiwa wafatnya istri tercinta pada 2000 silam. Kematian pasangan hidup yang kebersamaan selama hampir setengah abad, tentu bukan perkara mudah. Begitupun bagi Ali. “Saya bisa lihat, Bapak agak terpukul, padahal biasanya orangnya tegar,” kenang Mahendra. Apalagi, kematian Rendasih terjadi dalam waktu singkat. “Proses ibu dari sakit sampai meninggal cepat sekali,” lanjutnya. Praktis, lima belas tahun setelahnya, Ali hidup tanpa istri di sampingnya. Setelah ditinggal Rendasih, Ali sempat menunaikan ibadah haji. Sepulangnya dari ibadah itulah, Ali rutin memanggil guru mengaji ke rumah. Tentu saja, anak beserta cucunya diajak serta.

Saat tak lagi didampingi sang istri, Ali yang saat itu dirawat putri



Mahendra (kiri)
dan Ganesha
(kanan)

Foto
Anas Nur
Huda

pertamanya, tak jarang merindukan putra-putrinya yang lain. Diceritakan Mahendra, sang ayah punya cara sendiri untuk memanggilnya datang ke rumah kala rindu melanda. “Biasanya *daddy* bilang kalo komputer rusak, *benerin dong*. Nah itu tandanya dia kangen,” cerita Mahendra sembari tersenyum.

Itu sebabnya, Mahendra membekali sang ayah ponsel, sebagai alat komunikasi. Sayangnya, ponsel tersebut tak selalu aktif. Sambil tertawa, Ganesha bercerita bahwa mertuanya selalu menonaktifkan ponselnya. “Kalo aktif, artinya beliau mau menelepon,” kata Ganesha disambut gelak tawa Mahendra. Ujung-ujungnya, Mahendra lebih sering menelepon sopir Ali untuk sekadar tahu kabar sang ayah.

Selain ponsel, Ali juga dibekali *ipad*. Alat satu ini sengaja dihadiahkan Mahendra, guna membantu kelancaran hobi sang ayah yang begitu menggemari teka-teki silang. Diceritakan Ganesha, pada usia senja, Ali Wardhana begitu meminati permainan satu itu. Setiap pagi setelah menyantap sarapan, Ali dengan tekun menyelesaikan teka-teki silang sembari sesekali menghisap cerutu kesayangannya.

Kepergian Ali

Ali wafat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta pada 14 September 2015. Sebelum meninggal, Ali sempat dirawat selama tiga minggu lamanya. Beberapa hari sebelum wafatnya, Ali terlihat senang menyaksikan keempat anaknya berkumpul di saat-saat terakhirnya. Ali pun mengangkat keempat jarinya di hadapan putra-putrinya itu. “Bapak memberi isyarat empat, yang berarti semua anakku ada di sini,” Mahendra mengenang.

Sebagaimana permintaannya terdahulu, Ali dimakamkan di pemakaman biasa, bukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. “Beliau dimakamkan di samping ibu dan ayahnya,” ucapnya. Sehari sebelum dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, para kerabat datang ke kediaman Ali untuk memberikan doa, diantaranya J.B. Sumarlin, Emil Salim, serta B.J Habibie. Habibie yang juga merupakan tetangga Ali, bahkan menyempatkan diri membacakan Surat Yasin di depan jenazah Ali. Sang teknokrat itu wafat di usianya yang ke-87 tahun.



**Sri Mulyani
Indrawati,**

Menteri Keuangan RI 2005-
2010 dan 2016-sekarang

Pak Ali Wardhana bersama Pak Widjojo Nitisastro adalah dua orang peletak landasan ekonomi Indonesia modern pascakemerdekaan. Sesudah merdeka, Indonesia sempat mengalami kondisi ekonomi yang sangat sulit. Ditandai pertumbuhan ekonomi yang kontraktif. Kemudian karena alasan politik, di masa orde Presiden Soekarno melakukan kebijakan yang *heavy* pada *security*. Itu membutuhkan anggaran militer yang sangat besar. Kita mendapat pinjaman dari Uni Soviet, Cina, juga Amerika. Pada saat yang sama, untuk menumbuhkan nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia, Presiden Soekarno menunjukkan dengan berbagai pembangunan. Itu semua membutuhkan biaya.

Karena tidak memiliki penerimaan dan pajak yang cukup, itu semua dibiayai dengan utang dan meminta Bank Indonesia untuk mencetak uang. Jika butuh uang untuk membangun, maka cetak uang lagi. Akibatnya, uang yang beredar jauh lebih besar dari kemampuan produksinya. Ini yang menyebabkan munculnya kemerosotan yang sangat dalam di bidang ekonomi. Inflasi yang sangat tinggi, pinjaman pemerintah yang tidak bisa dibayarkan kepada para kreditor luar negeri, dan sektor produksi yang merosot tajam.

Nah, pada era orde baru, Presiden Soeharto menunjuk Pak Widjojo Nitisastro dan Pak Ali Wardhana di dalam kabinetnya. Bersama tim ekonominya, keduanya mencoba membangun kembali ekonomi Indonesia dengan prinsip-prinsip pengelolaan ekonomi yang *prudent* dan berfokus pada fundamental. Bagaimana membangun sektor produksi terutama pertanian yang menguasai hajat hidup orang banyak, fokus kepada *human*

capital, seperti akses pendidikan dan kesehatan, serta makro ekonomi yang *prudent*.

Selain itu, Pak Ali Wardhana sangat terkenal di dunia sebagai Menteri Keuangan yang mampu mengelola penerimaan yang tiba-tiba melonjak tinggi dari penerimaan minyak dan gas (*oil boom*) untuk belanja negara yang produktif. Membangun sektor produksi yang rusak, irigasi, meng-*hire* penyuluh-penyuluh Jadi, *very comprehensive*, betul-betul startegis dan memikirkan kebutuhan Indonesia yang waktu itu sangat miskin dan kekurangan. Kemiskinan yang tadinya 70 persen turun menjadi 40-20 persen di masa Pak Ali Wardhana. Kemakmuran di desa mulai muncul. Itu yang disebut sebagai Indonesia termasuk *a few country* yang bisa *avoiding dutch disease* pada 1970.

Fenomena lain terkait reputasi teknokrasinya. Beliau sangat dihormati di kalangan internasional. Namun, Pak Ali Wardhana tidak hanya memikirkan Indonesia, tetapi juga negara-negara berkembang di dunia yang jatuh miskin setelah merdeka. Pada semua pidato-pidatonya sebagai Gubernur World Bank dan IMF, beliau memperjuangkan negara-negara miskin. Terakhir, beliau adalah orang yang punya visi sangat jelas, punya strategi, punya *leadership* dan punya nyali. Sebab banyak orang bisa saja punya segalanya macam, tapi dia tidak punya nyali. Dia punya determinasi dan kemampuan menjalankannya secara setahap demi setahap. Itu adalah sumbangan yang luar biasa dari Pak Ali Wardhana dalam konteks keuangan negara di Indonesia.



Chatib Basri

Menteri Keuangan 2013-2014

Saya memanggil beliau: Pak Ali. Di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), saya tidak pernah menjadi murid langsung Pak Ali. Beliau berhenti sebagai Dekan FEUI pada akhir tahun 1970-an lantaran kesibukannya di pemerintahan, sedangkan saya baru masuk di FEUI tahun 1986. Namun, saya mengenal Pak Ali lebih dalam tatkala ada di LPEM (Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat) FEUI. Sebelum itu, ketika masih menulis disertasi, saya pun banyak berhubungan dengan beliau. Saya banyak belajar dari beliau mengenai kebijakan ekonomi, reformasi birokrasi, juga deregulasi.

Pada periode pertama di Kementerian Keuangan yaitu 2006-2010, saya menjadi Staf Khusus Ibu Sri Mulyani. Waktu itu dicanangkan reformasi birokrasi. Sebetulnya, reformasi birokrasi yang dilakukan tahun 2007 itu bukanlah yang pertama. Upaya reformasi birokrasi yang pertama dimulai oleh Pak Ali Wardhana sekitar tahun 1971. Termasuk juga reformasi di Ditjen Bea dan Cukai. Pada saat itu, Ditjen Bea Cukai dianggap sebagai institusi yang sangat korup. Sejarah tunjangan kinerja Kementerian Keuangan yang berbeda dibanding institusi lain juga dimulai kala itu. Tunjangan kinerja sebagai insentif diberikan untuk mengurangi kemungkinan korupsi. Jadi, dasar-dasar reformasi birokrasi sebenarnya diterapkan oleh Pak Ali Wardhana.

Jika kita melihat pada tahun 1980-an, Pak Ali pula yang sebetulnya mendorong deregulasi, atau yang sekarang disebut oleh Presiden Jokowi sebagai “izin dipermudah”. Ketika itu harga minyak jatuh, kemudian rupiah didevaluasi. Dan untuk membuat

ekspor dan manufaktur kita tumbuh, dikeluarkanlah deregulasi pada pertengahan 1980-an. Jadi, jejak Pak Ali panjang sekali dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Saya banyak belajar dari Pak Ali soal implementasi kebijakan. Dari banyak hal saya ingat, ada satu hal yang beliau sampaikan secara bercanda. Katanya, “De, kita tuh kalau bikin policy di Indonesia, risiko untuk bocornya besar sekali dan ada kebijakan-kebijakan yang tidak boleh ada orang yang tahu.” Saya tanyakan kepada beliau, “Misalnya apa, Pak?” Lalu, beliau menjawab, “Devaluasi.”

Pak Ali bercerita, jika mau melakukan devaluasi, beliau selalu menanyakan kepada sekretarisnya, “Itu keputusan terakhir nomornya berapa?” Saya tanya, “Untuk apa, Pak?” Pak Ali menjawab, “Saya ketik sendiri. Karena kalau saya berikan keputusan itu, kemungkinan kertas karbonnya bocor dan macam-macam bisa terjadi.”

Ini satu hal kecil yang menunjukkan bagaimana Pak Ali Wardhana begitu akurat dan detail di dalam perencanaan untuk membuat satu kebijakan. Beliau bukan hanya melihat substansinya, tetapi bagaimana kebijakan itu di-*manage* sampai hal-hal yang paling kecil.





J.B. Sumarlin,
Menteri Keuangan 1988-1993



Hadiyanto,
Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan



Emil Salim,
Ketua Dewan Pertimbangan
Presiden 2010-2014

Pak Ali menjadi Menteri Keuangan selama lima belas tahun. Dia mungkin orang yang paling banyak berjasa kepada Kementerian Keuangan. Pengalamannya juga paling banyak. Kami pernah bersama-sama menjadi menteri di kabinet. Ia menjabat Menteri Keuangan, sedangkan saya menjadi Menteri Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara. Saat itu, saya membantu Pak Ali dalam pemberantasan pungli di Kantor Bendahara Negara di Jalan Juanda. Saya melakukan sidak di kantor tersebut pada Juli 1974. Waktu itu pungli masih banyak terjadi di sana.

Saya kira penting sekali menulis tentang Pak Ali. Selama lima belas tahun di Kementerian Keuangan, dia banyak mengeluarkan kebijakan penting. Misalnya, ketika fungsi Ditjen Bea dan Cukai digantikan SGS (Suisse Generale Surveillance) dari Eropa. Pada saat itu banyak terjadi pungli sehingga Ditjen Bea dan Cukai tidak bisa bekerja dengan efektif. Inisiatif untuk membersihkan Ditjen Bea dan Cukai datang dari Pak Ali sendiri. Pak Ali meminta kantor SGS dari Eropa untuk menggantikan fungsi Ditjen Bea dan Cukai. Kebijakan ini bagus untuk ditulis dan diketahui masyarakat.

Kiprah Prof. Dr. Ali Wardhana yang menjalani tugas sebagai Menteri Keuangan terlama yakni selama 15 tahun (1968-1983) dan sebagai Menko Ekonomi, Industri, dan Pengawasan Pembangunan selama 5 tahun (1983-1988) adalah bukti dedikasi beliau untuk negara Indonesia tidak perlu diragukan lagi.

Sebagai sosok yang cerdas dan tegas, beliau memberikan kontribusi yang nyata bagi kebangkitan serta pembangunan perekonomian Indonesia. Kepiawaiannya dalam menjaga stabilitas keuangan negara dibuktikan dengan berbagai terobosan kebijakan sejak awal Pemerintahan Orde Baru dengan penguatan fondasi perekonomian untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Profesionalitas beliau juga didukung keilmuannya di bidang ekonomi yang sangat mumpuni sehingga mampu menerapkannya dalam tugas seorang menteri yang menjadi kunci pembangunan pada masanya. Dalam internal Kementerian Keuangan, beliau juga sangat peduli akan organisasi dan menjaga integritas nama baik institusi. Kami berharap generasi muda Indonesia dapat meneladani kiprah Prof. Dr. Ali Wardhana sebagai birokrat dan juga akademisi yang sangat mencintai negara Indonesia.

Ali Wardhana memiliki background sebagai orang kampus, bukan orang politik. Dalam menjalankan pekerjaannya, Ali sangat mengandalkan integritas. Baginya, bekerja bukan untuk mendapatkan uang, mencari pangkat, ataupun berpolitik. Dia bekerja mengikuti hati nuraninya sebagai intelektual yang selalu mencari the truth atau kebenaran.

Mindset ini dibawa Ali sepanjang kehidupannya. Termasuk selama sepuluh tahun menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan pada saat yang bersamaan menjabat sebagai Menteri Keuangan. Tak pernah dia memiliki pikiran menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri.

Ketika masuk ke Kementerian Keuangan, bisa dibayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Ali. Tapi dia tak bilang ke siapa pun. Salah satu langkahnya yang sangat berani di tengah tekanan adalah membubarkan Ditjen Bea dan Cukai. Ali sendiri yang mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar tugas kapabeanan



Ganesha,
Menantu Ali Wardhana



Marzuki Usman,
Mantan Ketua Bapepam dan
Asisten Pribadi Ali Wardhana

dan cukai diserahkan kepada SGS yang berkedudukan di Swiss. Dalam waktu singkat, kepabeanan dan cukai menjadi bersih dan terhindar dari penyelewengan.

Saat ini, kita bisa dengan mudah membicarakan gebrakan-gebrakannya. Bagi dia, pasti setengah mati menjalankannya. Itulah yang sangat saya kagumi dari dirinya. Dia tetap selalu berada di jalan yang lurus meski dikelilingi banyak tekanan. Ali adalah sosok pemberani dan bermoral tinggi.

Pak Ali orangnya sangat informal. Beliau juga tegas dalam hal disiplin terutama untuk urusan menuntut ilmu, beliau ingin tahu. Ketika kita masih sekolah, *daddy* (panggilan Ali Wardhana di keluarganya) *concerned* menanyakan sekolah kita, tapi tidak menuntut kita harus punya nilai bagus, punya jurusan apa saja. Itu bebas. Tapi setelah kita selesai sekolah dan bekerja, dilepas saja. Itu urusan kita masing-masing.

Daddy juga kalau menjelaskan bahasa-bahasa ekonomi selalu dengan bahasa yang sederhana, tidak *complicated* sehingga mudah dicerna. Itu yang saya alami ketika saya masih menjadi mahasiswa. Bahasa *daddy* akan menyesuaikan dengan siapa dia berbicara.

Yang saya ingat ketika *daddy* pertama kali menjadi Menteri, menurut cerita beliau, saat itu *challenge*-nya sangat luar biasa. Waktu itu inflasi 600 persen. Perekonomian kacau balau. Susu tidak ada, gula tidak ada. Inflasi dari tiga digit di tahun 1968 bisa turun ke dua digit dalam kurun waktu satu tahun dan turun ke satu digit dalam waktu dua tahun. Bagi dia, (hal ini) dianggap sebagai suatu pencapaian yang luar biasa bagi negara.

Saya dengan pak Ali kenal cukup lama dari tahun 1968 sampai dengan 1998. Saya banyak belajar dari cara bekerja Pak Ali. Pak Ali sosok yang sangat teliti. Tidak boleh salah titik koma, tidak boleh salah kalimat. Itu semua saya contoh dan saya banyak belajar dari beliau. Hubungan saya dengan Pak Ali lebih banyak personal. Saya juga berani mengajukan pendapat ke beliau. Jadi hubungan Pak Ali dengan anak buahnya menjadi seperti teman. Itulah kebolehan Pak Ali, di kantor dia berwibawa, dihormati orang, namun ke bawahannya pun juga beliau hormat.

Pada periode Pak Ali, reformasi Departemen Keuangan pertama kali dilakukan seperti melakukan promosi berdasarkan performance. Sebagai contoh mengangkat saya yang pangkatnya masih muda, masih golongan IIIc, dia berani. Selain itu, beliau menaikkan penghasilan pegawai 9 kali. Kerja yang bagus dan reward menjadi kompensasi untuk bekerja tetapi kalau macam-macam, ya sudah, selesai. Langsung kita pecat saja. Saat itu, filosofi reformasi adalah untuk mencegah korupsi.

Pak Ali juga seorang pembelajar, belajar dari bawah. Itu yang membuat saya salut kepada beliau.


Emil Salim,

Kolega sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Menteri dengan Nurani Intelektual

Setelah generasi Widjojo Nitisastro pensiun dan digantikan oleh generasi muda, baik di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia maupun di berbagai Badan Pemerintahan, Pak Widjojo merasa perlu secara berkala bertemu dengan angkatan pengganti dalam makan siang bersama di gedung Bimasena untuk berbagi pengalaman secara informal dan penuh suasana persaudaraan.

Dalam salah satu pertemuan makan siang inilah Bung Ali Wardhana pernah berbagi pengalaman secara santai tapi serius. Bung Ali berpengalaman menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan sekaligus Menteri Keuangan serta Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri sehingga tumbuhlah dalam diri beliau perpaduan tanggung jawab selaku pejabat dengan ciri-ciri integritas intelektual yang berpihak pada kebenaran dan rasionalitas.

Dengan nada risau, Bung Ali Wardhana mengungkapkan kesulitan yang beliau hadapi ketika harus memilih antara pikiran rasionalitasnya

menjalankan kebijaksanaan ekonomi yang secara ilmiah bisa dipertanggung jawabkan namun juga harus berhadapan dengan tekanan politis dari kalangan Pemerintah dan para politisi yang berbeda pendapat. Suatu ketika Presiden Soeharto mengungkapkan janji di depan DPR untuk tidak melaksanakan devaluasi dengan menaikkan nilai tukar rupiah terhadap uang dollar. Dalam perkembangan ekonomi global, harga minyak bumi merosot tajam dengan akibat hasil devisa ekspor minyak bumi Indonesia merosot jatuh. Sementara nilai tukar rupiah tidak disesuaikan, maka spekulasi berbondong-bondong menukarkan rupiahnya dengan dollar. Keadaan ini semakin besar menekan nilai tukar resmi rupiah terhadap dollar. Kalangan politik, ABRI, para menteri dan pejabat menolak gagasan devaluasi, karena janji Presiden untuk tidak melakukannya. Apakah yang harus diperbuat seorang Menteri Keuangan dalam keadaan begini?

Sang Menteri Keuangan bersama dengan Menko Ekonomi-Keuangan menghadap Presiden dan Bung Ali ungkapkan situasi keadaan ekonomi

secara faktual dalam angka dengan proyeksi ekonomi pola “*business as usual*” di tahun-tahun depan yang suram dan proyeksi ekonomi dengan pola “devaluasi”. Bung Ali padukan kejujuran intelektualitasnya dengan tanggung jawab dirinya sebagai Menteri Keuangan. Pak Harto terkejut melihat proyeksi ekonomi “tanpa devaluasi”. Beliau bertanya “Mengapa ini dibiarkan?”. Secara bijak berbudaya Jawa, Bung Ali berhasil dan keluar dari pertemuan dengan Surat Keputusan Presiden mendevaluasi rupiah sehingga menyelamatkan ekonomi kita.

Pengalaman Bung Ali yang kedua adalah kisahnya tentang sulitnya kondisi di Kementerian Keuangan, antara lain Direktorat Jenderal Bea Cukai yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Berbagai insentif sudah diberikan. Gaji para pegawai Kementerian Keuangan dinaikkan 9 kali dibandingkan dengan gaji pegawai kementerian-kementerian lain. Tetapi, mengapa dampaknya tidak terasa? Apa lagi yang bisa diperbuat? Padahal langkah kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi Indonesia



Ali Wardhana menerapkan disiplin anggaran di lingkungan pemerintah dan perusahaan negara

Foto
Perpusnas

sangat bergantung pada dana keuangan negara sementara investasi swasta, baik dalam dan luar negeri, masih terbatas. Tarif bea masuk dari hasil impor-ekspor naik, namun hasil yang masuk ke kas negara mengecewakan. Dimanakah letak masalahnya?

Rasionalitas berpikir Bung Ali berjalan. Ia pelajari pengalaman negara berkembang. Ia temukan titik strategis yang perlu diperbaiki. Secara bertahap Bung Ali berbicara dengan Presiden dengan gaya bahasa yang halus. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Walau kemudian Bung Ali beralih fungsi di tahun 1983 dari Menteri Keuangan menjadi Menteri Koordinator Ekonomi, Industri dan Pembangunan (1983-1988) namun beliau secara gigih terus meyakinkan Presiden Soeharto untuk mengambil langkah reformasi aparatur Bea Cukai. Dalam sidang kabinet terbatas di tahun 1985, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4/1985 tentang reformasi perdagangan dan keuangan dan mengalihkan tugas Ditjen Bea Cukai

untuk dilaksanakan oleh *Societe General de Surveillance* (SGS) berkedudukan di Geneva, Swiss.

Pengalaman Bung Ali Wardhana lain yang dikisahkannya adalah menanggapi krisis ekonomi di permulaan masa Orde Baru. Indonesia dihantam krisis ekonomi sejak 1966 dengan tingkat inflasi 1.136,25 persen (1966), cadangan devisa USD19 juta (1966), rasio cadangan devisa dibanding impor 0,43, (1966), hutang luar-negeri USD530 juta, Produk Domestik Bruto 26,6 milyar USD (pada harga konstan 1995) di tahun 1966. Dalam situasi ekonomi seperti ini maka "Tim Ahli Ekonomi Presidium Kabinet" dibawah pimpinan Professor Widjojo Nitisastro, bidang keuangan di tangani Professor Ali Wardhana, serta rekan teknokrat lainnya diminta Ketua Presidium Kabinet, Jenderal Soeharto, untuk menanggulangi krisis ekonomi ini

Dalam usaha menundukkan inflasi pada masa pemerintahan yang sedang dalam proses perubahan dari pola "serba revolusi" ke pola "rasional intelektual"

tidaklah mudah. Menerapkan "bekerja dengan disiplin anggaran", terutama di lingkungan Perusahaan Negara dan kekuatan politik di daerah menghendaki keteguhan iman dan keuletan yang luar biasa. Di tengah berbagai bermacam ceriaan dari berbagai kalangan yang tak pernah mengenal "bekerja dengan disiplin anggaran", maka Bung Ali menderita hambatan dan tekanan yang luar biasa. Namun dengan ketabahan daya juangnya, ia berhasil mengatasinya.

Ketika saya pada masa sakitnya mengunjungi Bung Ali Wardhana di ICU Rumah Sakit, beliau sempat berbisik dengan senyum lebar: "We had a good fight!". "But now you must take a good rest", saya jawab dengan suara parau. Hari ini, empat tahun lalu Bung Ali Wardhana wafat, meninggalkan jejak contoh bagi semua kita untuk menjalankan tugas dimanapun dan dalam keadaan apapun agar tetap berjuang dan bekerja dengan tabah, penuh komitmen dan hati-nurani intelektual.



Marzuki Usman,

Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (1999)
Mantan Asisten Ali Wardhana

Kontribusi Prof. Dr. Ali Wardhana bagi Indonesia

Proyek Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Ekspor (PRPTE)

Alkisah, rekan di Departemen Pertanian di tahun 1977 merasa bahwa Badan Urusan Cess, yaitu suatu badan yang secara *ear-marked* memungut biaya dari para eksportir produsen komoditi ekspor tradisional seperti: karet, kopra, teh, kopi, dan biji coklat. Uang ini tidak masuk ke kas negara, dan digunakan langsung oleh Badan Cess yang berada di bawah Departemen Pertanian, untuk membantu para petani tanaman ekspor tersebut.

Ternyata dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan, di samping itu, cakupan dari pungutan hanya terbatas kepada barang-barang komoditi ekspor tradisional. Pihak Departemen Pertanian ingin cakupan pungutan lebih luas dan langsung dipakai dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk itu mereka mengusulkan Pajak Ekspor Tambahan (PET), dan bersifat *ear-marked* (Uang hasil Pungutan bisa langsung dipakai, dalam arti tidak disetor ke Kas Negara). Menteri Keuangan diminta untuk membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Ekspor Tambahan (PET) untuk seluruh komoditi ekspor,

dan bersifat *ear-marked*. Pekerjaan membuat PP ini harus saya kerjakan sebagai Direktur Investasi dan Kekayaan Negara. Sebagai *student* dari *free marked* nya, Milton Friedman, saya mengusulkan kepada Bapak Ali Wardhana, agar niat dari Departemen Pertanian itu diabaikan saja. Beliau setuju sekali.

Suatu siang, saya dipanggil oleh Pak Ali Wardhana dan beliau minta supaya saya menyampaikan draft PP-PET itu. Saya protes keras, bahwa hal ini secara teoritis menyalahi apa yang diajarkan di mata pelajaran Seminar Keuangan Negara di FE-UI, yaitu memperbolehkan praktek *ear-marked* kedalam sistem APBN Indonesia, dan bukankah kita sudah sepakat mengabaikan ide yang tidak-tidak ini! Beliau berkata bahwa, Marzuki, ini sudah keputusan sidang kabinet, ya supaya dilaksanakan saja.

Tetapi di dalam PP itu saya selipkan satu pasal yang menyatakan penggunaan hasil PET itu haruslah dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan dan Bappenas melalui semacam Daftar Isian Proyek (DIP), kita sebut DIP Like. Kemudian oleh Prof. Dr. Widjojo Nitisastro, yang semula seluruh uang yang akan disalurkan kepada para petani

komoditi ekspor dan bersifat sebagai subsidi diubah menjadi ada yang berupa komponen kredit, dan ada komponen yang nonkredit.

Komponen kredit harus dibayar kembali, jadi haruslah jelas siapa debitur penerima kredit. Sedangkan, komponen non kredit bersifat habis dibelanjakan, sehingga menjadi semacam subsidilah. Pihak Departemen Pertanian mengklaim bahwa hasil dari pada PET itu merupakan hak mereka. Ketika dengan PP-PET, uang itu ternyata dikontrol oleh Departemen Keuangan dan Bappenas dan tidak lagi semua berupa subsidi, mereka merasa, bahwa uang mereka telah dirampok oleh Departemen Keuangan (oleh Marzuki Usman).

Dalam praktek pelaksanaannya, ternyata dugaan bahwa akan terjadi penyimpangan menjadi kenyataan. Kenapa demikian? Tentu setiap birokrat senang sekali kalau punya proyek. Memiliki proyek berarti memiliki kuasa untuk berbelanja. Sebagai contoh, dinas perkebunan di Provinsi Jambi. Sebelum ada Proyek Rehabilitasi Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE), anggarannya hanya sebesar Rp300 juta pertahun. Begitu ada proyek PRPTE, anggarannya



Ali Wardhana membentuk tim pengkajian reformasi sistem perpajakan Indonesia (tax reform committee)

Foto
Perpusnas

meningkat menjadi Rp2 miliar. Dan ini memerlukan keahlian untuk berbelanja dan membuat proyek berhasil. Biasanya, yang paling cepat dikerjakan ialah berbelanja. Maka, komponen nonkredit akan segera habis, sedangkan komponen kredit dibuat menjadi fiktif. Akibatnya uang habis, tapi proyek tidak jalan, kebanyakan gagal dan banyak pejabat terpaksa masuk penjara.

Inpres Dati II

Instruksi Presiden Bantuan Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya ini dijalankan dalam rangka pemerintahan Presiden Soeharto ingin mempercepat pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Pada waktu itu Indonesia masih mengalami *boom* minyak. Saya, pada suatu hari di tahun 1978 mengusulkan kepada Pak Ali Wardhana bahwa sebaiknya ditawarkan pinjaman lunak kepada para bupati dan walikota untuk membiayai proyek pengembangan tanah (*land redevelopment project*) di

lokasi di dalam dan di luar jalan lingkar yang direncanakan akan dibangun pada kota-kota tertentu. Misalnya, pinjaman itu untuk 25 tahun termasuk 5 tahun waktu tenggang (*grace period*) dengan suku bunga nol persen.

Saya mengatakan, dengan cara seperti ini, bukanlah lebih baik dari pada subsidi Dati II. Pemerintah Dati II sebagai peminjam (*borrower*) baru mencicil pada tahun keenam, sementara dia sudah menerima pembayaran IPEDA (sekarang PBB) yang meningkat, karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)-nya sudah menaik sebagai akibat proyek itu. Hasil IPEDA yang bertambah ini dipergunakan untuk meningkatkan fasilitas perkotaan. Akibat berikutnya, IPEDA secara keseluruhan akan meningkat dan Menteri Keuangan tidak perlu lagi meneruskan program Inpres Dati II, karena Dati II sudah mampu membiayai dirinya sendiri.

Pak Ali Wardhana setuju sekali dengan ide ini dan meminta saya men-

draft surat Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum, yang isinya Menteri Keuangan menawarkan pinjaman lunak kepada bupati/walikota dengan persyaratan seperti diuraikan tadi. Aneh bin ajaib surat Menteri Keuangan itu lenyap tak berbekas. Ternyata surat Menteri Keuangan tadi berakhir di laci seorang pejabat eselon III di Departemen Dalam Negeri, tidak tahu apa alasannya untuk tidak memproses. Kemudian ketika teman saya Atar Sibero menjadi Direktur Jenderal Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Dirjen PUOD), Departemen Dalam Negeri, dia tahu akan surat itu. Beliau bertanya kepada saya di tahun 1988, apakah surat itu masih berlaku? Saya menjawab bahwa Indonesia tidak lagi dalam posisi yang seperti dulu, *boom* minyak sudah berlalu. Jadi kebijakan itu tinggal nostalgia belaka.



Mirza Adityaswara,

Ekonom

Mengenang Prof. Dr. Ali Wardhana

Terus terang saya bingung pada waktu diminta menulis tentang Prof. Ali Wardhana, karena saya tentu mengenal nama besar beliau, tetapi tidak sempat berinteraksi langsung. Pada waktu saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) tahun 1984, beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai Dekan FEUI. Pada waktu saya mendapat amanah di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI) di tahun 2010-2019, Prof. Ali Wardhana sudah tidak aktif di pemerintah. Beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan terlama yaitu dari tahun 1968 sampai 1983, dan terakhir menjabat sebagai Menko EKUIN di tahun 1983-1988. Setelah tidak menjadi menteri, selama beberapa tahun beliau tetap aktif berperan sebagai penasihat ekonomi pemerintah. Beliau wafat 14 September 2015 di usia 87 tahun.

Kinerja Prof. Ali Wardhana bisa dibagi dalam 3 periode, yaitu periode rehabilitasi ekonomi (tahun 1966-1973), periode *boom* minyak (tahun 1973-1982), dan periode turunnya harga minyak (1983-1991). Ali Wardhana menyebut periode 1966-1973 sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi. Ekonomi pada tahun 1966 menghadapi hiperinflasi, serta anggaran pemerintah dibiayai oleh pencetakan uang. Salah satu

dari tiga tuntutan rakyat (TRITURA) pada saat itu ialah turunkan harga. Komitmen nasional untuk membenahi ekonomi mandatnya didapat dari TAP MPRS tahun 1966. Ali Wardhana berperan penting merumuskan kesimpulan dua seminar (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Angkatan Darat) yang kemudian melahirkan TAP MPRS tersebut. Usia beliau pada saat itu 38 tahun.

Dimulailah perencanaan pembangunan yang lebih baik, REPELITA periode pertama 1968-1973 yang mana pemerintah fokusnya membenahi infrastruktur serta mulai melakukan disiplin anggaran. Tidak ada lagi pencetakan uang oleh Bank Indonesia untuk membiayai defisit anggaran pemerintah. Pembiayaan defisit dilakukan dengan bantuan lunak dari negara donor. Untuk menarik minat investasi, penanaman modal asing dibuka, beberapa bank asing diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan harapan bahwa nasabah bank asing menjadi terpicak masuk ke Indonesia. Di bidang moneter, sistem kurs mata uang Rupiah diganti dari “multiple exchange rate” menjadi kurs tunggal di tengah tantangan di tahun 1971 ketika dunia menghadapi bubarnya sistem moneter Bretton Woods. Hasil dari berbagai kebijakan stabilisasi yakni hiperinflasi berhasil diturunkan

dalam jangka waktu 3 tahun.

Pada masa lalu Indonesia merupakan net eksportir minyak. Tatkala periode *boom* minyak tahun 1973-1982, pemerintah menggunakan surplus penerimaan untuk membangun sektor kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur pertanian demi meningkatkan produksi beras. Banjirnya uang minyak membuat kurs rupiah menjadi terlalu kuat yang bisa berdampak “traded sector” tidak kompetitif (biasa disebut “Dutch Disease”). Indonesia menjadi terlena. Desakan politik sangat kuat untuk membangun mega proyek “substitusi impor”. Pertamina melakukan ekspansi bisnis di luar wilayah bisnisnya. Pada periode inilah justru kemudian terjadi krisis utang luar negeri Pertamina. Dalam rangka menjaga daya saing sektor ekspor, pemerintah kemudian melakukan devaluasi di tahun 1978. Ali Wardhana mengatakan bahwa pelajaran dari keterlenaan *boom* minyak adalah pemerintah harus mengawasi risiko BUMN serta harus mempersiapkan lebih awal penguatan sektor ekspor nonmigas.

Kolapsnya harga minyak dan penguatan kurs Yen pada periode 1983-1992 mengakibatkan pemerintah harus melakukan penghematan dan melakukan deregulasi ekonomi. Harga



Ali Wardhana mengatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan ekspor nonmigas

Foto
Perpusnas

minyak pada tahun 1980-1988 jatuh dari USD 120 per barel ke USD 40 sehingga penerimaan pemerintah turun signifikan. Kurs Yen terhadap USD menguat dari Y250 ke Y150, akibatnya beban utang pemerintah membengkak. Ali Wardhana mengatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan ekspor nonmigas. Dan agar ekspor kompetitif, maka proses produksi domestik harus efisien. Kemudian, dilakukan reformasi pajak tahun 1983, memperkenalkan sistem *self assesment* dan mengganti Pajak Penjualan dengan PPN.

Ali Wardhana mengatakan, prinsip deregulasi ialah harga harus wajar (termasuk harga dana), berjalannya mekanisme pasar, serta proses ekspor impor yang efisien. Tahun 1983 dilakukan deregulasi suku bunga, yaitu tidak ada lagi pagu suku bunga dan pagu kredit. Tahun 1985, Ditjen Bea Cukai dibekukan, diganti dengan SGS. Tahun 1986, 1987, 1988 dilakukan deregulasi perdagangan. Deregulasi sektor keuangan (perbankan, pasar modal dan nonbank) berlanjut di periode tahun 1988-1992. Giro wajib minimum diturunkan drastis dari 11 persen ke 2 persen. Ali Wardhana kemudian

mengakui bahwa deregulasi sektor keuangan terlalu agresif karena aturan permodalan terlalu kecil, likuiditas terlalu longgar sehingga menimbulkan ekonomi “bubble” dan perilaku bankir yang “tidak prudent”. Maka dari itu kemudian di tahun 1991 pemerintah melakukan pengetatan aturan utang luar negeri serta Bank Indonesia menerbitkan aturan kehati-hatian termasuk permodalan dan batas maksimum kredit kepada satu pihak. Tapi ternyata berbagai aturan tersebut belum cukup ampuh untuk mencegah terjadinya “buble ekonomi di tahun 1995-1997 dan kemudian menjadi krisis ekonomi tahun 1998”. Kritik lain terhadap strategi ekonomi Orde Baru adalah pembangunan masih terpusat di Jawa, membesarkan konglomerasi dan belum berhasil membangun sektor usaha menengah yang kuat.

Ali Wardhana menaruh perhatian kepada sumber daya manusia. Ia mengirim pegawai Depkeu sejak tahun 1973 untuk sekolah lanjutan di luar negeri. Untuk peningkatan kinerja, pegawai Depkeu diberi tunjangan khusus tapi jam kerja ditambah 2 jam. Oleh bawahannya, Ali

Wardhana dikenal sebagai pribadi yang tegas, tetapi sebenarnya bersahabat. J.B. Kristiadi menceritakan bahwa pada waktu masih tugas belajar, Pak Menkeu bersedia membalas surat-suratnya. Sementara Dani Sudarsono bercerita bahwa Ali Wardhana mau ditemani golf oleh dirinya yang hanya pegawai rendah, bahkan Pak Menkeu mau berkunjung ke rumahnya.

Pelajaran yang bisa ditarik dari seorang Ali Wardhana adalah beliau sadar bahwa Indonesia harus mendorong ekspor untuk mendapatkan devisa guna membiayai impor dan membayar utang luar negeri. Beliau sadar bahwa utang luar negeri harus dikendalikan, dan risiko BUMN harus dipantau ketat. Satu kemewahan yang dimiliki periode Ali Wardhana adalah sistem politik yang sederhana, yaitu kekuasaan di satu tangan yaitu Presiden, sehingga sangat mudah koordinasi dengan berbagai kementerian dan pemerintah daerah, serta eksekusi bisa cepat. Sebaliknya, pada periode sekarang koordinasi menjadi barang yang paling mahal.

Dari Sepak Bola sampai Tekan Tekan Silang

Teks Yani Kurnia

Selain dikenal dengan kaca mata dan badan tegapnya setinggi 170 cm, Ali Wardhana juga dikenal dengan hobi bugarnya: olah raga. Memiliki postur tinggi dan atletis, Ali menjaga kebugarannya dengan menjalankan olah raga teratur. Olah raganya pun tak cuma satu. Di sela-sela kesibukannya yang sangat padat, Ali selalu menyempatkan diri di hari libur untuk olah tubuh. Kegemarannya ini dilakukan untuk menyalurkan hobi sekaligus bercengkrama secara informal dengan



Pada tahun 1980, Ali pernah menjadi penjaga gawang untuk tim Departemen Keuangan

Foto
Dok. Pribadi

kolega dan keluarganya.

Boling adalah kegemaran yang tak lepas dari waktu luang Ali Wardhana. Bahkan Ibu Rendasih Ali Wardhana pun juga melakukan hobi yang sama. Tahun 1970 memang merupakan era dimana Indonesia baru mengenal olah raga yang merupakan singkatan dari “bola gelinding” ini. Tak heran, Ali juga mengikuti olah raga yang sedang tren saat itu. Tempat favorit Ali dan keluarga untuk bermain boling adalah Ancol Bowling Center yang terletak di area Jakarta Utara.



Bukan hanya boling, pasangan suami istri ini juga gemar bermain golf dan tenis. Bahkan jika bermain tenis, anak-anak beliau juga tak lupa diajak turut serta. “Karena dia suka olahraga, dari tenis, boling, golf. Jadi waktu tenis dia selalu ngajak (anak-anaknya). Dengan alm. Sumitro, alm. Sudharmono. Kita anak-anak ikut diajak”, tutur putra Ali Wardhana, Mahendra Wardhana. Kegemaran tenis ini juga menular padanya dan menjadi hobi sang putra hingga dewasa.

Selain itu, sama seperti kaum pria pada umumnya, Ali Wardhana juga senang bermain sepak bola. Biasanya dia didapuk menjadi kiper di tim kesebelasannya. Pada tahun 1980, Ali pernah menjadi penjaga gawang untuk tim Departemen Keuangan dalam sebuah pertandingan persahabatan melawan kesebelasan perusahaan asuransi milik negara dan berakhir dengan skor 6-1 untuk kemenangan Departemen Keuangan.

Kepiawaian Ali di bidang olah raga membuatnya fit dan menunjang pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan selama 15 tahun. Kegemarannya melakukan olah raga nyatanya mampu mendukung kegiatan Ali hingga usianya 87 tahun. Kegemarannya merokok cerutu seakan tidak mempengaruhi kebugarannya hingga usia senja.

Banyak penelitian menyebutkan bahwa gemar berolahraga tak hanya bermanfaat pada kesehatan fisik saja. Faktanya olahraga juga bermanfaat untuk kesehatan pikiran maupun jiwa. Selain mendapatkan fisik yang prima, manfaat lain dari gemar berolahraga yaitu mengatasi gangguan kecemasan, mendongkrak sistem imun, membuat tidur lebih berkualitas, dan mempertajam otak.

Yang patut untuk ditiru, di masa

pensiunnya, Ali Wardhana juga gemar mengisi Teka Teki Silang (TTS). Selain dengan rutin membaca surat kabar, kegemaran barunya ini dilakukannya untuk mengasah otak. Hobi barunya ini mendukung kemampuan memorinya sehingga beliau tidak pikun di usia senja. Tak ayal, Ali tak hanya dikenal dengan kebugaran fisik saja namun juga bugar pemikirannya.

KAMPUS ALI WARDHANA

Rupanya kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dahulu juga dikenal dengan Kampus Ali Wardhana. Pada tahun pertama berdirinya, penyelenggaraan pendidikan STAN masih menggunakan penyebutan kampus Purnawarman. Kampus STAN Bintaro mulai digunakan pada tahun 1988, 2 tahun setelah peresmianya oleh Menteri Keuangan RI saat itu, Radius Prawiro pada tanggal 16 Juli 1986. Sejak saat itu Kampus Bintaro menjadi kampus STAN atau yang dikenal juga dengan nama kampus Ali Wardhana. Nama kampus Ali Wardhana ini diberikan sebagai penghargaan kepadanya atas pengabdianya sebagai Menteri Keuangan selama 15 tahun. STAN sendiri secara legal dikukuhkan dengan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan RI No.1/PMK/1977 tanggal 18 Februari 1977 yang ditetapkan Ali Wardhana sebagai Menteri Keuangan saat itu.

Bengawan Solo Riwatmu ini Sedari dulu jadi Perhatian insani *** Musim



"Keroncong Bale". Sebuah acara bulanan pertunjukan musik yang menampilkan berbagai genre kelompok orkes keroncong (O.K), khususnya dari Solo Raya.

Foto
Resha Aditya
Pratama

Alunan Mendayu Nan Mengalun Jauh

Teks Dimach Putra

Solo, kota praja di tenggara Jawa Tengah ini dikenal sebagai salah satu pusat seni dan budaya Indonesia. Di kota yang masih kental dengan nilai tradisi inilah Ali Wardhana lahir. Berbicara tentang kesenian dan kebudayaan di Solo, mending Menteri Keuangan tersebut memiliki favoritnya tersendiri. Menurut pengisahan anak dan para kerabat, Ali Wardhana dikenal sebagai penikmat musik keroncong.

Aliran musik yang sering dianggap berakar dari Fado, seni musik Bangsa Portugis, memang tidak lahir dari tanah para Raja Jawa. Asal keroncong justru dipercaya dari Kampung Tugu di Jakarta. Daerah itu merupakan hunian komunitas keturunan eks budak-budak Portugis yang telah dimerdekakan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa seiring perkembangannya banyak nama-nama besar maestro keroncong yang justru lahir di kota ini. Tak heran, jika kini Solo semakin menancapkan kukunya sebagai barometer musik

keroncong di nusantara. Siapa yang tak kenal "Bengawan Solo" gubahan Gesang sang Buaya Keroncong. Lagu yang erat dengan kota Bengawan dan membuat musik ini semakin dikenal luas mendunia.

Musik yang mengawinkan instrumen barat dengan penghayatan budaya lokal ini begitu dirayakan dengan antusias oleh segenap warga kota. Meski syair-syair yang dilantunkan cenderung sendu mendayu, namun nostalgia yang dibangkitkan lewat nadanadanya memberi manis bagi pahitnya hidup masa tempo dulu. Tak hanya mereka yang tua, kaum muda pun kini turut melestarikan keroncong dengan pendekatan personal mereka.

Sebagai kiblat musik keroncong, tentu dibutuhkan wadah untuk menampung kreatifitas para senimannya. Solo Keroncong Festival, gelaran tahunan yang menampilkan musisi keroncong nasional dan internasional telah diselenggarakan sebanyak sepuluh kali di kota bengawan ini. Tapi tak perlu menunggu setahun sekali untuk dapat menikmati sajian musik yang sangat khas ini.

Rabu (18/09) lalu saya berkesempatan menghadiri "Keroncong Bale". Sebuah acara bulanan pertunjukan musik yang menampilkan berbagai genre kelompok orkes keroncong (O.K), khususnya dari Solo Raya. Acara yang digagas oleh Bentara Budaya Solo ini menjadi wadah bagi penggiat dan penikmat keroncong untuk dapat bertemu saling mengisi dahaga. Dahaga berkesenian bagi senimannya, dan dahaga mendapat tontonan bagus bagi para peminatnya.

Keroncong Bale biasanya diadakan pada Jumat ketiga setiap bulan. Namun saat saya ke sana, kebetulan jadwalnya disesuaikan dengan perayaan hari ulang

tahun lembaga kebudayaan tersebut. Pentas musik yang dimulai pukul delapan malam itu diadakan di Balai Soedjatmoko yang merupakan markas dari Bentara Budaya Solo.

Teras gedung berlanggam kolonial peranakan disulap menjadi panggung sederhana nan elok. Berhias kain yang menjuntai dari langit-langit sebagai *backdrop* dipercantik dengan sorotan lampu warna-warni. Malam itu O.K Swastika yang tampil. Kelompok seniman keroncong yang sangat disegani itu membawakan 11 tembang keroncong yang bertema air, selaras tema perayaan ulang tahun yang mengangkat Bengawan Solo. Dan tentu saja, gubahan sang maestro keroncong asli Solo tersebut menjadi pamungkas dalam pertunjukan malam itu.

Tak hanya bergaya festival, keroncong juga dapat dinikmati dengan cara lain. Musisi jalanan pun memainkan musik ini. Meski formasi yang ditampilkan tidak selalu lengkap menampilkan tujuh instrumen pokok keroncong, yaitu: ukulele cak, ukulele cuk, biola, flute, sello dan kontrabass. Jika Anda beruntung, musisi keroncong mungkin akan dapat Anda temukan saat melakukan wisata kuliner. Seperti yang saya temui saat mampir ke warung Bakso Kadipolo. Alunan merdunya menemani dan menambah kenikmatan tiap suap hidangan yang saya santap. Sungguh keroncong telah menjadi musik latar di seluruh penjuru kota. Mengalun jauh mengisi tiap sisi kehidupan penduduk kota bengawan.



Pak Ali, Sang Arsitek Ekonomi

Peresensi Abdul Aziz

Berawal dari makan siang bersama Ali Wardhana di awal 2014, Mari Pangestu memperoleh ide untuk menyusun sebuah buku sebagai bentuk penghormatan (*tribute*) kepada sang maestro ekonomi Indonesia. Ya, seorang 'maestro'. Siapa yang tidak kenal dengan Ali Wardhana, seorang profesor, guru, teknokrat, dan Menteri Keuangan terlama di Indonesia?

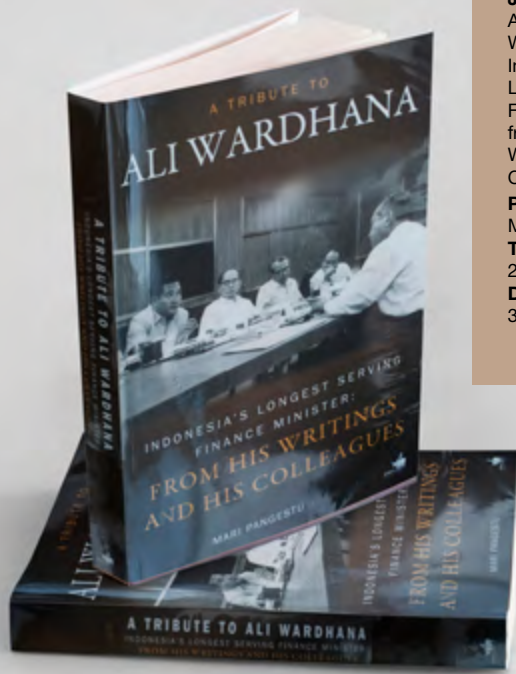
Sebagai editor dalam buku ini, Mari masih ingat betul permintaan Ali Wardhana untuk menghubungi David Cole, seorang penasihat untuk kebijakan ekonomi dan keuangan Indonesia dari Harvard Institute for International Development. Dengan menggunakan relasinya, Mari pun segera merealisasikan pekerjaan yang tidak mudah itu. Ia harus menyusun serpihan pidato-pidato Ali Wardhana saat acara pertemuan tahunan World Bank (WB) and International Monetary Fund (IMF) periode 1969-1982 yang berjumlah lima

belas pidato. Hal itu berarti sepanjang kariernya sebagai Menteri Keuangan, Ali senantiasa hadir dan berpidato di setiap pertemuan tahunan WB-IMF.

Lima belas tahun menjabat sebagai Menteri Keuangan tidak hanya menjadi bukti kemahirannya dalam bidang ekonomi dan moneter. Ia juga diakui hingga level internasional dengan ditunjuk sebagai *Chairman* dalam pertemuan tahunan WB-IMF 1972. Dalam berbagai ulasan hasil seminarnya, Ali Wardhana dikenal berhasil mengeluarkan inovasi dan prinsip penting dalam kebijakan publik. Salah satu yang fenomenal adalah keberhasilannya dalam menurunkan hiperinflasi pada tahun 1966. Hanya dalam waktu tiga tahun, ia berhasil menekan inflasi dari 650 persen menjadi 10 persen.

Buku berdimensi 306 halaman ini menggunakan Bahasa Inggris pada setiap tulisannya. Sampul coklat pada halaman depan dikemas apik dengan fokus foto saat Ali Wardhana sedang menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia kepada Presiden Soeharto. Secara plot cerita, Mari Pangestu berhasil mengurai titik krusial dari sepak terjang Ali Wardhana ke dalam tiga bagian besar.

Bagian pertama tentu saja kelima belas pidato spektakulernya saat pertemuan tahunan WB-IMF. Menurut Mari, buku ini tidak boleh sekedar berisi pidato-pidato saja, namun juga lebih sebagai bentuk apresiasi (*tribute*) kepada kontribusi Ali Wardhana untuk Indonesia selama ini. Oleh sebab itu, pada bagian kedua, Mari memasukkan empat artikel terpilih yang merupakan hasil pemikiran Ali Wardhana. Terakhir, Mari juga mengungkapkan kisah manusiawi sosok Ali Wardhana melalui testimoni dari orang-orang terdekatnya. Tak lupa kisah personal dari keluarga, sahabat, rekan kerja, dan para menteri keuangan setelahnya.



Judul:
A Tribute Ali Wardhana, Indonesia's Longest Serving Finance Minister: from His Writing and His Colleagues
Pengarang:
Mari Pangestu
Tahun Terbit:
2015
Dimensi:
306 Halaman



"Transformasi birokrasi memang bisa memakan waktu. Tapi tanpa reformasi lembaga-lembaga publik dan birokrasi, maka penyesuaian secara struktural tidak akan mencapai hasil maksimal"

ALI WARDHANA

HARI PENERBANGAN NASIONAL

27 OKTOBER 2019



Foto
Perpusnas



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA